

Milik Depdiknas  
Tidak diperdagangkan



# **SAREKAT ISLAM DAN PERGERAKAN POLITIK DI PALEMBANG**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
JAKARTA  
2001

**SAREKAT ISLAM DAN  
PERGERAKAN POLITIK  
DI PALEMBANG**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
JAKARTA  
2001**

## **SAREKAT ISLAM DAN PERGERAKAN POLITIK DI PALEMBANG**

**Penulis** : **Dra. Triana Wulandari**  
**Muchtaruddin Ibrahim**

**Penyunting** : **Dra. Sri Sutjiatiningsih**

**Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang**

**Diterbitkan oleh** : **Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional**

**Jakarta 2001**

**Edisi I**

**Dicetak oleh** : **CV. SUKOREJO BERSINAR**

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional (Proyek PKSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejujuran, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek PKSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek PKSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya  
Proyek PKSN sebagaimana adanya ditangan pembaca, kami  
sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2001

Direktur Jenderal Kebudayaan



IGN. Anom  
NIP 130353848

## PENGANTAR

Buku *Sarekat Islam Dan Pergerakan Politik Di Palembang* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian penulisan yang diselenggarakan Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2001.

Buku ini menguraikan tentang Palembang Selayang Pandang, Masuknya Sarekat Islam, Mobilitas Sarikat Islam di Keresidenan dan Perlawanan Menentang Pemerintah Kolonial serta Perjuangan Politik Setelah Tahun 1920.

Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah informasi kesejarahan mengenai peran serta masyarakat dalam masa pembangunan dan dalam perjalanan bangsa Indonesia pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat, dan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran sejarah masyarakat terutama generasi penerus bangsa.

Jakarta, September 2001

**Pemimpin Proyek Peningkatan  
Kesadaran Sejarah Nasional**



**Wiwi Kuswiah**  
NIP 131125902

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II Palembang Selayang Pandang</b>	
2.1 Sebelum Berdirinya Kerajaan Islam di Palembang .....	5
2.2 Palembang Dalam Masa Kerajaan Islam .....	11
2.3 Palembang Sesudah Kerajaan Islam .....	20
<b>Bab III Proses Masuknya Sarikat Islam di Palembang</b>	
3.1 Masuknya Agama Islam .....	29
3.2 Sarikat Islam Pembangkit Semangat persatuan .....	34
3.2.1 Berdirinya Sarikat Islam .....	34
3.2.2 Berdirinya Sarikat Islam di Palembang .....	41
<b>Bab IV Mobilitas Sarikat Islam di Karesidenan Palembang .....</b>	<b>47</b>

<b>Bab V</b>	<b>Perlawanan Menentang Pemerintah Kolonial</b>	
5.1	Perlawanan di daerah Rawas (1915) .....	60
5.2	Perlawanan di Muara Tulung Selapan (1916) ...	67
5.3	Perlawanan di Daerah Onderafdeling Komerling Ulu (1918) .....	68
5.4	Perlawanan di Dusun Karta Mulia (1918) .....	69
5.5	Akibat Perlawanan .....	70
<b>Bab V.</b>	<b>Perjuangan Politik Setelah Tahun 1920 .....</b>	<b>75</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....		<b>85</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

Diakui atau tidak, Sarikat Islam merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang bersifat kerakyatan. Organisasi ini menjadi pelopor kebangkitan politik bangsa yang bernafaskan Islam. Berdirinya Sarikat Islam berangkat dari adanya kesadaran bersama tokoh-tokoh bangsa yang telah terpelajar. Mereka dapat membaca situasi zaman dan mereka tidak rela melihat bangsanya diperlakukan seperti kuda tunggangan yang tidak pernah diberi kesempatan untuk melepas lelah barang sekejappun. Tanpa tenggang rasa, belas kasihan, kolonialis Belanda yang memburu harta kekayaan, terus memacu dengan berbagai bentuk peraturan dan kebijakan yang memberatkan rakyat.

Karenanya, Serikat Islam tampil ke depan untuk mendobrak dinding-dinding penyekat yang telah dibangun beratus tahun lamanya oleh kolonialis Belanda. Sehingga rakyat Indonesia yang berdiam di berbagai pulau dan hidup dalam lingkungan aneka budaya, berbagai bentuk adat dan tradisi serta bahasa yang berbeda, kemudian bersatu dalam mencapai cita-cita.

Meluasnya pengaruh Sarikat Islam, sebenarnya bukan saja karena kepiawaian para propagandisnya yang fasih dalam menyampaikan pesan, tetapi juga dipercepat oleh misi yang ditawarkan, seperti tertera dalam tujuan anggaran dasar Sarikat

Islam, yaitu kerakyatan, persaudaraan dan tolong-menolong sesama anggotanya. Berangkat dari hal tersebut, dalam waktu singkat Sarikat Islam dapat tersebar ke seluruh pelosok dan diterima oleh semua lapisan baik dari kalangan atas sampai pada lapisan bawah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Sarikat Islam merupakan organisasi politik pertama yang berhasil membangkitkan kesadaran politik bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini, proyek PKSN yang kegiatannya antara lain melakukan penulisan sejarah lokal pada tahun anggaran 2000 ini memasukkan kegiatan penulisan Sejarah Lokal Sumatra Selatan. Sehubungan dengan itu, agar kajiannya lebih terfokus, kami menekankan kajiannya pada **Peranan Sarikat Islam di Palembang** (Karesidenan Palembang) tahun 1911-1920. Pemilihan judul tersebut tidak lain, karena Sarikat Islam di daerah ini berdiri dan berkembang hampir bersamaan dengan Sarikat Islam di Jawa. Kehadiran Sarikat Islam di daerah ini mendapat sambutan yang baik di Palembang bahkan juga di daerah Uluan (pedalaman). Dalam menjalankan aktivitasnya Sarikat Islam di daerah ini berhasil menggoyang kedudukan pemerintah kolonial Belanda setempat dan bahkan menggusarkan pemerintah kolonial di Batavia. Sarikat Islam di daerah Uluan mampu memobilisasi massa untuk melakukan gerakan perlawanan bersenjata. Karena gerakan ini banyak pemimpin SI daerah Uluan yang masuk penjara bahkan ada yang diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda keluar daerah Palembang. Berkaitan dengan itu, pada tahun dua puluhan Pemerintah Kolonial menetapkan Sarikat Islam menjadi organisasi terlarang di daerah hukum Palembang.

Berhubung terbatasnya waktu yang tersedia, penulisan ini hanya mengacu pada karya-karya sejarah yang ada, seperti buku-buku dan naskah-naskah. Namun demikian, untuk mendukung kelengkapan data, kami juga mencari sumber-sumber penulisan dipelbagai tempat, seperti perpustakaan, arsip dan dokumentasi baik milik badan/instansi maupun koleksi pribadi.

Selanjutnya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah penulisan sejarah dan tentunya dari data-data yang terseleksi,

dilakukan penulisan. Tulisan ini dimaksudkan sebagai bacaan pelengkap bagi pelajaran sejarah masyarakat luas, khususnya anak didik. Sehubungan dengan itu penulisan ini tidak ditekankan pada analistis tetapi lebih bersifat diskriptis.

Untuk mendapat gambaran tentang Peranan Sarikat Islam di Karesidenan Palembang tahun 1911-1920, sistematika penulisannya dibagi dalam 5 bab, dengan uraiannya sebagai berikut:

- Bab I Palembang Selayang Pandang**, membahas Karesidenan Palembang sebelum berkembangnya agama Islam, karena itu banyak menyinggung tentang kejayaan Sriwijaya sampai keruntuhannya. Selanjutnya menguraikan peranan Islam dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Setelah kejayaan kerajaan berakhir dan dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, Palembang menjadi sebuah karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen Belanda.
- Bab II Proses Masuknya Sarikat Islam di Palembang**, mengemukakan tentang masuknya agama Islam sampai kelahiran Sarikat Islam Palembang dan proses perkembangannya.
- Bab III Mobilitas Sarikat Islam di Karesidenan Palembang**, memaparkan aktivitas Sarikat Islam, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan sosial dalam menentang kekuasaan kolonial Belanda.
- Bab IV Perlawanan dan Akibatnya**, menguraikan gerakan perlawanan yang dilakukan Sarikat Islam, sehingga Sarikat Islam dibubarkan oleh pemerintah kolonial dan tokoh-tokoh ditangkap kemudian diasingkan ke daerah lain.
- Bab V Penutup**, sebagai penutup diuraikan pergerakan politik setelah tahun 1920 di Palembang seperti PNI, Partindo, PSII, PII dan Gerindo.

Diharapkan tulisan ini dapat memberi setitik informasi yang berguna, khususnya bagi generasi penerus. Lewat tulisan ini,

kiranya dapat menambah pemahaman, kearifan dan wawasan dalam bidang kesejarahan. Kisah-kisah heroik dan patriotik yang terekam dari masa yang lalu ini mudah-mudahan selanjutnya dapat menjadi pedoman di masa akan datang.

Kemudian dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik berupa buku dan naskah, maupun gagasan dan fikiran, sehingga kami dapat menyelesaikan tulisan ini. Kesemua itu, pengorbanan dan jasa baik yang kami terima, kami tak dapat membalasnya, hanyalah kami serahkan kepada Allah SWT, semoga memberikan balasannya. Amin.

Tim Penulis

## BAB II

### PALEMBANG SELAYANG PANDANG

#### ***2.1 Sebelum Berdirinya Kerajaan Islam di Palembang***

Dewasa ini secara administratif, Palembang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatra Selatan. Ibukotanya adalah Palembang dan kota ini terletak pada kanan kiri Sungai Musi. Dahulu daerah ini juga bernama Palembang dengan ibukota Kota Palembang. Jadi nama daerah ini sama dengan nama ibukotanya. Nama ini mulai dikenal waktu masa pemerintahan Kesultanan Palembang. Kemudian setelah Palembang jatuh ke tangan kekuasaan Belanda daerah ini dijadikan daerah setingkat karesidenan dan dinamai Karesidenan Palembang. Wilayahnya meliputi wilayah Kesultanan Palembang atau sama dengan wilayah Provinsi Sumatra Selatan sekarang.

Ada yang berpendapat bahwa nama Palembang berasal dari kata *pa* dan *limbang*. Limbang artinya membersihkan biji besi atau logam dari tanah atau benda kotor lainnya. Pembersihan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan keranjang kecil. Untuk membersihkan biji besi yang kotor ini, biasanya keranjang kecil ini dimasukan dalam air dan kemudian keranjang itu digoyang-goyangkan; sampai bersih. Sedang kata *pa* dalam bahasa Melayu adalah menunjuk nama suatu tempat. Dengan demikian

Palembang berarti tempat yang sedang berlangsung suatu usaha pembersihan biji besi.

Menurut cerita lain, Palembang adalah tempat mencuci emas urai dan biji timah. Hal ini mungkin dikaitkan karena sejak dahulu Palembang merupakan tempat tinggal raja-raja zaman Hindu dan pada masa Kerajaan Islam Palembang menjadi tempat tinggal para sultan atau kraton. Oleh karena itu tidak mustahil, bila para penguasa itu memerintahkan rakyatnya untuk membawa logam yang belum dibersihkan ke tempat ini yang kemudian oleh para ahlinya logam tersebut dibersihkan di hadapan para penguasa dan hal ini dilakukan untuk menghindari pencurian logam-logam tersebut.

Sedang menurut pendapat lain, nama Palembang berasal dari kata *Limba*. *Limba* artinya tanah yang hanyut di sungai dan mengendap di tepiannya. Selain itu, ada juga berpendapat bahwa nama ini berasal dari kata *pala - abang*, yang dalam bahasa Jawa berarti *kepala merah*. Kalau hal ini dapat diyakini berarti orang yang tinggal di tempat ini dahulu, berkepala merah. Tetapi pendapat yang terakhir ini dasarnya kurang kuat dan tidak dapat diterima kebenarannya.

Letak dan kedudukan Palembang sangat strategis. Hal ini terlihat dari peranan yang dimainkannya dalam perkembangan sejarah bangsa. Palembang pernah mengalami kejayaan baik di bidang politik, maupun di bidang budaya. Dalam bidang budaya, daerah ini telah dapat mempertemukan dua peradaban besar dunia, terutama pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Peradaban besar itu antara lain peradaban India dengan ajaran agamanya dan peradaban Cina dengan ilmu pengetahuannya.

Dalam percaturan politik, Palembang dalam masa Sriwijaya berhasil menjalin persahabatan antara Jawa dan Sumatra dan ini dapat terlihat dengan nyata, bahwa dinasti yang membangun kerajaan di Palembang adalah keturunan raja-raja Jawa. Begitu juga sebaliknya dinasti yang membangun Kerajaan Islam Demak adalah Raden Patah yang berasal dari keturunan raja Palembang.

Berangkat dari kenyataan itu, maka para politisi bangsa menyatakan, bahwa dasar persatuan bangsa Indonesia telah diletakkan oleh penguasa Sriwijaya yang kemudian dilanjutkan oleh Majapahit.

Dalam perkembangan lebih lanjut pusat kekuasaan Kerajaan Sriwijaya berpindah dari Palembang ke Bukit Siguntang. Perpindahan pusat kerajaan ini, dilakukan oleh para pelarian dari kerajaan di hulu Sungai Batanghari Sembilan atau Sungai Batanghari Jambi.

Demikianlah, pada tahun 683 Masehi kerajaan ini telah berpusat di Bukit Siguntang dan Dapunta Hyang adalah pendiri pertama dusun ini. Rajanya ini masih merupakan turunan dari dinasti Syaelendra. Berdirinya tempat sebagai pusat Sriwijaya yang besar telah menjadi lambang pusat kekuasaan yang syah. Karena pengikut, wilayah kekuasaannya, rakyat atau penduduk di daerah itu mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan kepada raja.

Pemindahan pusat kekuasaan biasanya dilakukan tidaklah bersifat kekerasan, hal ini karena hubungan antara kerajaan-kerajaan Sungai yang pernah menjadi *rever's port capital* telah terjalin sedemikian baik dan menunjukkan adanya sistim *konfederasi*, seperti berlaku di negara Malaysia sekarang. Penunjukan kepala negara atau raja berdasarkan kharisma dan faktor-faktor geografis yang lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Berdasarkan pada inilah maka pusat kerajaan kadang-kadang berpusat di Kantoli (daerah danau Ranau Kayuagung, Sekampung, Muara Tembesi, Muara Zabag, Muara Takus dan akhirnya sejak tahun 683 Masehi berpusat di Bukit Siguntang.

Setelah mengalami perkembangan, kemudian pada tahun 775 Masehi kerajaan Sriwijaya mendirikan suatu pangkalan di semenanjung Malaya tepatnya di daerah Ligor (tanah genting Kra). Melalui jalan tradisional lewat Selat Malaka dan melalui tanah genting Kra pada waktu itu merupakan pintu gerbang pelayaran perdagangan dunia.

Besar kecilnya pengaruh *river's port capital* itu tergantung pada situasi dan kondisi. Dalam tahun 683 pengaruh Palembang sebagai ibukota pelabuhan sungai dan pada tahun 775 digantikan oleh Ligor. Kemudian pada tahun 824 berpindah ke Jawa dan akhirnya tahun 850 kembali ke Palembang sebagai asal mulanya dinasti. Penguasaan atas daerah di seluruh Nusantara berdasar hubungan keluarga dekat melalui garis keturunan *patrinal*. Dan kekuasaan Sriwijaya ini mempergunakan sistem *konfederasi* dengan pusat dinasti yang mula-mula di Palembang.

Begitu juga untuk menjaga kestabilan kekuasaannya, Sriwijaya mengadakan hubungan baik dengan Cina dan Cola. Untuk mempererat tali hubungan, maka sering atau setiap tahun selalu saling mengirimkan utusan masing-masing dan sebagai tanda hubungan baik, penguasa Sriwijaya dan Cina saling memberikan tanda mata.

Pada tahun 1016/1017 merupakan puncak kesempurnaan Sriwijaya dan kerajaan merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Konflik antara Sriwijaya dengan raja Dhamarwangsa berakhir dengan kekalahan pihak Jawa Timur. Dengan demikian kekuasaan Sriwijaya membentang luas dengan menguasai 15 negeri jajahan. Sebagai akibatnya hubungan antara Sriwijaya dengan kerajaan Chola tidak lagi berjalan menurut semestinya, bahkan kemudian berubah menjadi permusuhan yang tak dapat dielakan. Pada tahun 1025 kerajaan Chola telah dapat menaklukkan daerah di sekitarnya. Nafsu imperialismenya bukan saja ditunjukkan pada daerah sekitarnya, tetapi lebih jauh, sebenarnya ditunjukkan pada daerah-daerah yang mengakui kekuasaan Sriwijaya, terutama daerah yang terletak di Semenanjung Malaya.

Meskipun daerah ini telah dikuasai oleh kerajaan Chola, tetapi Chola kemudian memberikan kemerdekaan untuk memerintah sendiri, dengan syarat semua kerajaan tersebut harus mengakui Chola sebagai yang dipertuan. Kendatipun mendapat tekanan dari Chola, Sri Dewa, raja Sriwijaya yang menggantikan kedudukan ayahnya tetapi berani mengadakan hubungan baik dengan Cina.



Pada abad XII Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Kota pelabuhan Jambi tidak lagi menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya. Keadaan ini karena terjadi penggantian pimpinan. Tetapi kemudian pada permulaan abad XIII Masehi, Sriwijaya muncul kembali sebagai suatu kekuatan maritim yang pernah memiliki hegemoni tunggal di Asia Tenggara.

Kemudian pada akhir abad 14, Sriwijaya dapat ditlaklukan oleh Jawa. Penaklukan ini terkenal dengan ekspedisi *Tumasik* 1377 – 1397 dan ekspedisi merupakan realisasi dari sumpah Palapa Patih Gajahmada. Usaha ini merupakan kelanjutan politik magis Kartanegara untuk mengakhiri kekuasaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang.

Agaknya ekspedisi Tumasik tersebut dilakukan telah menelan waktu selama 20 tahun lamanya. Dengan ekspedisi yang cukup lama ini, akhirnya abad 14 Sriwijaya tenggalan dari kejayaannya.

Sementara itu, Islam sebagai idiologi negara telah berkembang di Sumatra bagian utara, sebagai akibat keadaan dan motif politik yang menguasainya. Islam merupakan alat politik peneteresi yang tajam bagi penguasa-penguasa bandar di sepanjang Selat Malaka. Proses ini terus berlangsung baik dengan India atau penguasa Budha maupun dengan ekspansi Cina. Peneterasi Islam mendapat lahan yang subur dalam sentral-sentral dagang yang berdasarkan atas perhitungan politik dan ekonomi. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu panjang berdirilah bandar-bandar dagang bagaikan jalinan mata rantai seperti Samudra Pasai, Perlok, Zabag, Malaka, Palembang dan tempat-tempat lainnya. Selanjutnya tempat ini tumbuh menjadi pusat politik, ekonomi dan kebudayaan dan sekaligus merupakan pusat-pusat ekspansi baru dan Islam sebagai alat penggeraknya.

Palembang sebagai kota dagang dan pelabuhan internasional yang telah tunduk kepada kekuasaan Majapahit, hubungan kekuasaan dengan Majapahit atas daerah ini tidak begitu mantap. Oleh karena itu terjadilah kekacauan-kekacauan dalam masyarakat dalam menghadapi kekuasaan yang baru, bahkan kemudian

tempat ini menjadi pelarian prompak-prompak Cina. Pada tahun 1407 armada Ming dibawah pimpinan Laksama Haji Sam Po Bo alias Cheng Ho dalam rangka ekspedisi ke Asia Tenggara telah dapat memutuskan hubungan Palembang dengan Jawa. Kaisar Yang Lo telah mempergunakan kesempatan yang baik itu, pada saat Sriwijaya dan Jawa terjadi ketegangan. Dengan Islam sebagai alat yang ampuh, Kaisar Cina mengirinkan tentara Islam dari Yunan, karena lalu lintas niaga di perairan Selat Malaka dikuasai oleh pedagang-pedagang muslim. Sehingga karenanya hubungan daerah ini dengan Cina tetap terjalin baik.

Pada tahun 1443 Palembang kembali mendapat perhatian dari Majapahit, dan ini ditandai dengan ditempatkannya seorang wakil yang bernama Arya Damar atau Swan Liong, dengan pangkat adipati. Pengangkatan Arya Damar yang masih termasuk keluarga raja tetapi telah memeluk agama Islam itu karena Palembang pada 1407 - 1443 itu dikuasai oleh Cina Muslim. Di samping itu, Arya Damar mendapat kepercayaan untuk menjadi kapten Cina Muslim di Palembang atas persetujuan Haji Gun En Cu.

Arya Damar alias Swan Liong kawin dengan seorang putri Cina yang merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya. Pada tahun 1445 putri Cina tersebut melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Jin Bun yang kemudian namanya lebih dikenal dengan sebutan Raden Patah. Ia dididik dan dibesarkan di Palembang dan kelak mendirikan Kerajaan Demak.

Arya Damar alias Swan Liong pada masa kecilnya mendapat didikan secara Islam, bahkan pernah mendapat tuntunan dari Raden Rachmat atau Sunan Ngampel. Sehingga ia menjadi seorang yang fanatik terhadap agama Islam. Kemudian namanya diganti menjadi Arya Dilah atau Jaka Dilah.

Setelah Majapahit runtuh kedudukannya digantikan oleh Kerajaan Islam Demak yang didirikan Raden Patah yang berasal dari Palembang. Dengan segera kerajaan baru ini mendapat pengakuan dari Palembang. Sebagai negeri maritim, Palembang memiliki watak yang khas yaitu selalu ingin melepaskan diri dari

ikatan kerajaan lain manapun. Oleh karena itu, setelah keruntuhan Majapahit, ikatan dengan Kerajaan Demak, Pajang dan Mataram sebagai pengganti Majapahit menjadi longgar.

Timbulnya kericuhan-kericuhan di kraton Demak sebagai akibat perebutan tahta telah memberi keuntungan bagi Palembang. Kericuhan-kericuhan itu menyebabkan pindahnya beberapa orang bangsawan Demak ke Palembang antara lain adalah Ki Gedeng Suro, yang selanjutnya menjadi cikal bakal sultan-sultan di Palembang.

## ***2.2 Palembang Dalam Masa Kerajaan Islam***

Kehadiran Islam sebagai agama boleh dikatakan berlangsung secara damai. Kehadiran Islam ini merubah wajah peta pelayaran dan perdagangan di Nusantara ke dalam pelukan pedagang Islam. Proses tersebut kemudian diikuti oleh berdirinya bandar-bandar baru yang bercorak Islam. Bandar-bandar tersebut terus timbul dan berkembang yang diatur oleh penguasa-penguasa yang menamakan diri sebagai raja atau sultan. Seiring dengan ini terlihatlah bandar-bandar penting di sepanjang Selat Malaka seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Gersik dan terus ke ujung timur Nusantara seperti Ternate dan Tidore.

Kedamaian pelayaran dan perdagangan yang telah diciptakan oleh Islam mulai kandas oleh kehadiran bangsa-bangsa Barat seperti yang telah dirintis oleh bangsa Portugis. Pedagang muslim semakin terjepit dan terdesak ketika Malaka jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511. Kedatangan bangsa Portugis ke dunia timur dengan membawa misi perang salibnya untuk mengalahkan orang Islam. Praktik demikian terlihat setelah mereka berkuasa. Pedagang-pedagang Islam yang dulunya hidup damai kemudian tidak mendapat tempat di Malaka. Dan kejatuhan Malaka ini merupakan titik awal jatuhnya Kepulauan Nusantara ke dalam kekuasaan imperialis barat.

Namun hal itu rupanya membawa hikmah bagi pedagang muslim. Karena setelah Selat Malaka dikuasai Portugis, pelayaran

dan perdagangan dialihkan melalui jalur Selat Sunda dan Pantai barat Sumatra. Pergeseran ini merupakan satu di antara beberapa sebab berdirinya Kerajaan Banten dan bandar lain di sepanjang pantai Sumatra bagian barat. Dengan demikian tradisi maritim yang telah diletakkan oleh Sriwijaya di Palembang tidak pernah pudar. Penguasa boleh berganti, tetapi Palembang, terus tumbuh dan berkembang sebagai bandar penting yang ditandai dengan hadir dan berkumpulnya para pedagang. Tumbuh dan berkembangnya Palembang menjadi pusat perniagaan adalah karena berdirinya suatu pusat kekuasaan. Berdirinya Palembang menjadi Kesultanan Palembang berkaitan erat dengan berkembangnya Kerajaan Demak. Demak seperti yang telah disinggung di atas didirikan oleh Raden Patah yang berasal dari Palembang. Puncak kejayaan Demak bersamaan dengan hilangnya kekuasaan Majapahit di Nusantara sebagai penguasa tunggal.

Kejayaan Demak berakhir setelah timbulnya perebutan tahta di kalangan pewarisnya. Sebagai akibatnya menyebarlah tokoh-tokoh ke daerah pedalaman yang ditandai berdirinya Pajang dan Mataram dan ke barat berdirinya Cirebon dan Banten. Dalam kaitan ini, setelah Sultan Trenggono memenangkan kraton di Demak pada tahun 1525 menunjuk Ki Gedeng Suro, putra dari Pangeran Sidang Lautan, sebagai wakil penguasa Demak di Palembang, dengan gelar Pangeran. Maka sejak itu mulailah pemerintahan Ki Gedeng Suro 1528 - 1545 di Palembang.

Adapun Pangeran Sidang Lautan, kedudukannya adalah sebagai Panglima Perang Demak tetapi sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis, ia bersama keluarganya pulang ke Palembang. Kemudian dalam usaha Demak menyerang Portugis di Malaka, Pangeran Sidang Lautan mendapat tugas dari Demak mempersiapkan armada perang guna membantu Pati Unus dalam menyerang Malaka yang telah dipersiapkan sejak tahun 1509. Akan tetapi nasib malang baginya, ia gugur dalam penyerangan yang dilakukan tahun 1513. Dengan alasan inilah agaknya, Sultan Trenggono menunjuk putra Pangeran Sidang Lautan, Ki Gedeng Suro untuk memerintah Kesultanan Palembang 1528 - 1545. Penguasa Palembang ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan

Ki Gedeng Suro Tuo. Tetapi karena ia tidak berputra, maka diangkatlah keponakannya yang datang dari Jawa (Demak), yang memerintah tahun 1546 – 1575. Karena menggantikan kedudukan pamannya, maka ia mendapat panggilan Ki Gedeng Suro Mudo.

Berdirinya Palembang sebagai kekuatan baru telah menjadi penghalang bagi Banten untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Padahal Banten pada waktu itu sedang berusaha untuk menaklukkan Pajajaran. Sedang ke arah barat Banten telah berhasil meluaskan kekuasaannya ke seberang yaitu ke Lampung dan Selebar (Bengkulu). Namun Banten belum merasa puas bila pelabuhan Palembang belum dikuasai. Banten melihat Palembang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran di Selat Malaka. Di samping itu daerah ini juga penting karena menyimpan kekayaan hasil bumi yang melimpah.

Keinginan Banten untuk melebarkan kekuasaannya sebenarnya didorong oleh Pangeran Mas, putra Arya Penggiri yang lari dari Demak ke Banten. Karena tidak mendapat jabatan seperti yang diharapkannya, ia kemudian mengembara ke Malaka dan kembali ke Banten. Di Banten Pangeran Mas hidup sebagai bangsawan agung dan hubungannya sangat rapat dengan Sultan Mohammad yang masih berusia muda. Pangeran Mas mendorong sultan yang masih muda itu untuk merebut Palembang.

Dalam rangka itu, sebagai langkah awal Pangeran mas menganjurkan agar Banten berusaha menjadikan Palembang menjadi daerah takluknya. Dengan demikian akan terbuka luas jalan perniagaan di Selat Malaka. Bila Palembang berhasil dikuasai Pangeran Mas berharap dapat diangkat menjadi Sultan di Palembang. Untuk meyakinkan Sultan, Pangeran Mas menyatakan akan tetap setia pada Banten sebagai pewaris Kerajaan Demak.

Akan tetapi tuntutan Banten itu tidak mendapat sambutan yang baik dari Palembang. Sebaliknya Yang Dipertuan Palembang, Ki Gedeng Suro menyatakan dengan tegas, bahwa hak pertuanan mereka adalah sama yaitu berasal dari Demak. Ki Gedeng Suro sendiri juga seorang bangsawan dari Demak yang pindah ke Palembang. Kalau Palembang hendak mengakui takluk, bukanlah

ke Banten, tetapi harusnya ke Mataram, karena Mataram dianggap sebagai penerus Majapahit.

Penolakan ini agaknya sudah menjadi watak masyarakat Palembang yang selalu menginginkan kebebasan. Orang Palembang tak dapat ditekan. Bahkan kalau ditekan mereka akan balik menentang dan tidak setia. Hal seperti ini pernah terjadi pada Majapahit yang telah menaklukkan Palembang, tetapi kalau ada kesempatan Palembang bangkit kembali menentang Majapahit.

Karena Palembang menentang, maka Banten yang sedang haus kekuasaan itu melancarkan serangan terhadap Palembang. Serangan ini dilakukan pada tahun 1596 dan langsung dibawah pimpinan Sultan Mohammad Kanjeng Ratu Banten. Perahu-perahu pasukan Banten berhasil masuk Sungai Musi sehingga terjadilah pertempuran hebat. Pihak Palembang dipimpin langsung oleh Ki Gedeng Suro. Dalam pertempuran ini Palembang nyaris kalah, karena desakan hebat dari Banten. Tetapi nasib sial menimpa Banten, karena Sultan Mohammad yang berdiri di barisan depan terkena peluru dan tewas seketika. Peristiwa ini memaksa Banten untuk tidak melanjutkan pertempuran dan dengan perasaan duka yang dalam pasukan Banten membawa jenazah Sultannya pulang.

Dalam perkembangannya lebih lanjut Ki Gedeng Suro digantikan oleh putri satu-satunya yang kawin dengan putra Raja Jambi. Perkawinan ini menimbulkan perebutan kekuasaan antara putra Raja Jambi dengan saudara-saudara Ki Gedeng Suro dan akhirnya dimenangkan oleh Ki Mas Adipati dan ia memerintah sampai tahun 1587. Setelah Ki Mas Adipati wafat disebut Panembahan. Kemudian ia digantikan oleh saudara laki-lakinya bernama Den Arya (Raja Den Arya). Ia dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan ia terbunuh ketika berusaha mengambil istri orang Pada tahun 1588. Sebagai penggantinya kemudian dinobatkan saudaranya bernama Pangeran Made Angkoso dan memerintah sampai 1623. Kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Made Alit yang memerintah 1623-1624. Setelah itu Palembang diperintah oleh Pangeran Seda Ing Pura (1624 - 1630) dan diteruskan oleh Pangeran Ing Kenayan.

Sebenarnya kedudukan Pangeran Seda Ing Kenayan adalah sebagai Mangkubumi, sedangkan yang memerintah adalah permaisurinya Ratu Pembayun. Ratu ini lebih dikenal dengan nama Ratu Sinuhun dan ia sebenarnya adalah saudara sepupu Pangeran Ing Kanayan sendiri. Ratu Sinuhun memerintah tahun 1630 – 1642. Dalam menjalankan pemerintahannya ia sangat disegani dan dianggap sebagai orang yang memperkenalkan peraturan-peraturan adat pertama yang berlaku di daerah Uluan. Peraturan yang dipakai di daerah Uluan itu disebut *Undang-undang Sambarcahaya*. Adapun yang menyusun undang-undang tersebut adalah Ratu Sinuhun sendiri dibantu oleh suaminya, para menteri dan alim ulama. Undang-undang ini merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam. Undang-undang ini merupakan adat asli tertua yang ditulis dalam aksara Arab. Undang-undang tersebut diberlakukan sejak abad XVII. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman undang-undang tersebut diperluas dengan undang-undang wilayah. Di daerah Bangka – Belitung undang-undang ini disebut Undang-undang *Sindang Mardika*. Pada masa Belanda undang-undang ini tetap dipakai, meskipun sifatnya berubah dari undang-undang dasar menjadi undang-undang adat (hukum adat).

Sejak tahun 1642 Palembang diperintah oleh Pangeran Seda Ing Pasarean. Pada masa ini timbul perselisihan dengan orang barat (VOC) yang telah beberapa lama menetap di Palembang. VOC memaksakan kehendak, sehingga orang-orang Palembang terpaksa menembak dan menawan beberapa serdadu VOC. Pangeran Seda Ing Pasarean cedera dalam pertempuran itu, ia digantikan oleh saudaranya, Pangeran Mangkurat, yang biasa disebut Raden Temenggung. Dalam konflik yang terus berkepanjangan ini, VOC mengerahkan kekuatannya dan kemudian berhasil menghancurkan Kota Palembang Lama. Raja dan rakyat terpaksa meninggalkan kota ini.

Melihat keadaan Kota Palembang yang telah dibumihanguskan tentara VOC, Pangeran Mangkubumi dengan sebutan Pangeran Mangkurat Sida Ing Razak atau Ki Gedeng Razak mengingkir ke luar kota. Selanjutnya kekuasaan diserahkan kepada adiknya,

Pangeran Ratu yang tadinya bernama Raden Temenggung Palembang Ki Mas Hindi: Pangeran Mangkurat Sida Ing Razak atau Ki Gedeng Razak tidak lagi bersedia pulang ke Palembang dan ia mangkat di Saka Tiga.

Setelah kakaknya wafat, Pangeran Ratu Ki Mas Hindi dinobatkan menjadi raja. Ia memerintah tahun 1662 – 1708, pemerintahannya berlangsung cukup lama. Sultan ini menjalankan pemerintahan dengan baik. Pada 1675 Pangeran Ratu Ki Mas Hindi diberi gelar Sultan Abdurrahman. Ia juga terkenal dengan nama Jamaluddin. Nama ini telah diabadikan dalam cerita rakyat Palembang yang terkenal dengan Sunan Cinde-balang, kata ini diambil dari kata *Candiwalang* yaitu nama makam yang artinya tempat duka cita atau tempat kesedihan yang terletak di belakang pasar Cinde.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa raja Palembang yang terkenal adalah Sultan Abdurrahman atau Sultan Jamaluddin Candiwalang memerintah dari tahun 1662 – 1706, suatu pemerintahan yang cukup lama. Pada masa ini negara telah teratur baik, rakyat hidup senang dan makmur. Sultan Abdurrahman adalah seorang raja yang alim dan bijaksana. Pada tahun 1675 Sultan menyatakan Palembang sebagai Kerajaan Islam yang berdaulat dengan nama Palembang Darussalam dan rajanya bergelar Sultan.

Pada masa ini hubungan dengan Mataram menjadi renggang. Pada tahun 1644 dan 1668 Palembang masih mengirim utusan ke Mataram dengan membawa gajah dan beberapa barang lainnya. Sultan Mataram, Susuhunan Amangkurat menganggap Palembang tidak setia. Mataram menuduh Palembang lebih menghormati Belanda di Batavia dari pada Mataram. Pada hal Palembang sendiri sebenarnya masih setia pada Mataram dan ini terbukti ketika Trunajaya memberontak pada tahun 1677 Palembang mengirimkan 10 buah kapal untuk membantu Mataram. Tetapi sesudah peristiwa tersebut, hubungan Palembang dan Mataram putus sama sekali.

Setelah Palembang menyatakan diri sebagai Kerajaan Islam, hubungan dengan daerah Uluu berjalan baik. Hal ini karena



adanya kepentingan timbul balik. Penguasa Uluan mendapat perlindungan dari Sultan dan sebagai buktinya Sultan Palembang memberikan kuasa kepada Pangeran Purbabuwana ing Pasemah, dusun Tanjungkurung untuk mengumumkan peraturan-peraturan raja kepada rakyat agar daerah itu dapat tumbuh dalam suasana damai.

Pada tahun 1701 Sultan Abdurrahman mengundurkan diri dari pemerintahan dan hidup sebagai *bagawan* (ulama) dan tahun 1706 baginda wafat. Penggantinya adalah putranya, Raden Aria yang sejak tahun 1701 telah diserahi tugas untuk menjalankan pemerintahan dengan gelar Pangeran Ratu Senapati. Setelah dilantik menjadi raja Pangeran Ratu Senapati, bergelar Sultan Ratu Mansur dan memerintah selama 12 tahun (1706 – 1718). Sebelum diangkat menjadi raja Raden Aria sering tampil dalam pemerintahan khususnya soal politik, seperti persoalan Tembesi dan perselisihan dengan Banten. Berdasarkan itulah maka agaknya ia ditunjuk menggantikan ayahnya sebagai Sultan Palembang.

Meskipun Sultan Mansur telah menjalankan pemerintahan dengan baik, namun timbul perselisihan dengan saudara-saudaranya. Sultan Mansur pernah berselisih dengan kakaknya tentang tahta, tetapi karena kakaknya itu wafat, maka Sultan Mansur otomatis menggantikan ayahnya.

Selanjutnya dalam pergantian raja, sesuai dengan nasihat keluarga raja serta pertimbangan Sultan Mansur sendiri, maka tahta tidak diserahkan kepada putranya, akan tetapi diberikan kepada saudaranya, Sultan Kamaruddin. Sultan Kamaruddin memerintah tahun 1718–1727. Dalam masa pemerintahan Sultan ini perselisihan terus berlangsung dengan putra-putra Sultan Mansur, yaitu antara Pangeran Dipati dan adiknya Pangeran Jaya Wikrama atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Lembu. Karena tidak dapat mengatasi perselisihan ini Sultan Kamaruddin terpaksa minta bantuan kepada VOC. Adanya bantuan VOC ini memaksa Pangeran Dipati atau Pangeran Anom melarikan diri. Sultan Kamaruddin kemudian menyerahkan kedudukannya kepada Pangeran Jaya Wikrama yang kawin dengan putri

Kamaruddin. Setelah dinobatkan Pangeran Jaya Wikrama bergelar Sultan Mahmud Badaruddin I yang memerintah sampai tahun 1756. Setelah wafat ia disebut Sunan Lemahabang karena dimakamkan di Lemah Abang makam raja-raja Palembang yang terletak di Kampung Ilir.

Dalam tahun 1757-1775 Kerajaan Palembang diperintah oleh putra Sultan Mahmud Badaruddin yang kemudian bergelar Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusuma. Kemudian dalam tahun 1775 Sultan Ahmad Najamuddin I digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Bahauddin. Sultan ini memerintah sampai tahun 1903.

Pada umumnya raja-raja tersebut hanya meneruskan pemerintah pendahulunya. Sistem pemerintahan dan pengaturan masyarakat serta hukum yang dijalankan tidak mengalami perubahan sama sekali. Hubungan para sultan dengan penguasa-penguasa (Pasirah) Uluan tetap seperti biasa. Pasirah-pasirah Uluan ikut dalam *Seba* pada akhir bulan Puasa atau rapat besar kerajaan. Sedang *seba* biasa diadakan dua hari dalam seminggu atau menurut kehendak raja. Didalam *seba* di belakang dan disamping raja duduk di atas tanah enam orang yang memegang senapan dengan gagang ke arah badannya, delapan orang memanggul tombak, seorang memegang tameng dan seorang lagi memegang pedang, seorang memegang tempat pisang, tempat sirih, dan tempat air.

Pada awal abad ke-19 Kerajaan Palembang diperintah oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang juga disebut Sultan Mahmud Ternate. Ia adalah putra dari Sultan Mohammad Badaruddin yang memerintah pada tahun 1804 - 1821. Sultan Mahmud Badaruddin II adalah seorang raja yang mempunyai martabat tinggi, agung cerdas dan berpengetahuan luas. Ia juga seorang organisatoris yang baik, diplomat yang cerdas dan ahli dalam taktik strategi perang. Selain itu ia seorang budayawan dan seniman, yang telah menggubah *Syair Nuri*, *Syair Sanyer Kista* dan pantun berjudul *Untuk Pelipur Lara*. Karena itu dapat dikatakan ia merupakan raja terbesar dalam deretan raja-raja Palembang. Dapat dikatakan

masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan zaman keemasan bagi Kerajaan Palembang. Pada masa ini ia dapat menunjukkan dan mempertahankan Palembang sebagai kerajaan maritim yang ingin mempertahankan kebebasan terhadap rongrongan baik dari dalam maupun dari luar.

Pada 24-4-1812 keraton Palembang jatuh ke tangan Inggris di bawah pimpinan Mayor Jenderal Gillispie. Kekalahan Palembang adalah karena kekurangan senjata dan karena penghianatan Pangeran Adipati Najamuddin adik Sultan Badaruddin. Karena itu Sultan Badaruddin meninggalkan keraton dengan membawa alat-alat kerajaan dan kekayaannya menuju daerah pedalaman untuk melanjutkan perjuangannya. Sedang adiknya Pangeran Adipati Najamuddin dinobatkan oleh Inggris sebagai Sultan Palembang dengan menandatangani beberapa perjanjian yang menguntungkan Inggris. Semenjak itu berkibirlah bendera Inggris di dalam benteng (keraton) Palembang.

Hijrahnya Sultan Badaruddin ke daerah pedalaman membawa pengaruh besar di kalangan masyarakat Uluu. Di pedalaman Sultan Badaruddin mengobarkan semangat perang jihad kepada rakyat dengan semboyan perang melawan kafir. Dengan semboyan tersebut para ulama maju sebagai obor pembakar semangat perlawanan.

Dalam masa 1819 – 1821 Kesultanan Palembang kembali merdeka penuh dan mengalami kemajuan. Akan tetapi penghianatan dilakukan lagi oleh Pangeran Prabu Anom putra sulung Sultan Ahmad Najamuddin II dan Najamuddin sendiri dibawa dari Batavia ke Palembang sebagai penunjuk jalan. Sehingga patahlah perlawanan Sultan Badaruddin. Ia ditangkap Belanda dan dibuang ke Ternate. Ia wafat 26-11-1852 sebagai orang buangan yang dihormati oleh kawan dan lawan.

Pada 16-7-1821 Pangeran Prabu Anom dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III. Tetapi karena kurang cakap maka kekuasaannya diambil alih oleh Belanda dan 7-10-1823 tamatlah riwayat Kerajaan Palembang Darussalam. Najamuddin III kemudian dibuang ke Batavia dan wafat tahun

1825. Sultan Najamuddin mencoba memberi perlawanan tetapi tidak berhasil. Demikianlah habislah riwayat Palembang setelah mengadakan perlawanan yang gigih terhadap Inggris dan Belanda.

### *2.3 Palembang Sesudah Kerajaan Islam*

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, membuat kedudukan Kota Palembang menjadi penting; bukan saja bagi pedagang muslim dari Malaka, tetapi juga menjadi tempat berkumpul bagi para pedagang Melayu, Jawa dan Cina. Jatuhnya Malaka telah pula membawa perubahan, karena telah membangkitkan Aceh dan lalu lintas perdagangan lewat Selat Sunda menjadi lebih penting. Begitu juga Kota Palembang sebagai daerah maritim telah mendapat kesempatan yang baik untuk berperan kembali sesudah jatuhnya Sriwijaya dan sirnanya kekuasaan Majapahit.

Kehadiran Portugis di Asia Tenggara nampaknya tidak begitu memperhatikan Palembang, mereka terus memfokuskan perhatiannya ke arah timur. Baru kemudian pada tahun 1617 Gubernur Jenderal Jan Piter Zoon Coen yang telah berkedudukan di Batavia mengirim utusan yang bernama Cryor van Raeburch, dengan maksud untuk mengadakan hubungan dagang dengan Palembang. Kedatangan utusan itu diterima baik oleh Penguasa Palembang. Sultan Agung (Raja Mataram) yang sedang berusaha keras untuk meluaskan kekuasaannya ke arah barat, menganggap siasat Belanda itu tidak menguntungkan. Sultan Agung kemudian menghubungi Palembang dan meminta agar Palembang tidak mengadakan hubungan dagang dengan VOC. Pangeran Seda Ing Kenayan Raja Palembang saat itu sedang menghadapi ancaman Banten. Karena itu ia terpaksa memberikan izin kepada Belanda untuk mendirikan loji di Palembang. Loji tersebut merupakan kantor dagang VOC yang pertama di Palembang dan didirikan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jacob Speckx.

Pada tahun 1641 setelah menduduki Malaka, VOC ingin memaksakan kehendak monopoli atas tanah di Bangka. Keinginan Belanda itu dipaksakan pada Palembang setelah mendengar,

bahwa Inggris akan mendirikan benteng di daerah ini. akibatnya timbul persaingan antara Belanda dan Inggris. Dalam persaingan ini, Raja Palembang, Pangeran Seda Ing Pasarean merasa terjepit oleh dua ancaman, yaitu dari Belanda dan Banten. Untuk mengatasi masalah tersebut, Sultan Palembang pada tahun 1642 mengirim utusan, Pangeran Mangkurat menghadap Sultan Agung dengan maksud untuk minta bantuan terutama dalam menghadapi ancaman Belanda dan Inggris yang akan memperebutkan Bangka. Sultan Agung Raja Mataram menyanggupi. Akan tetapi bantuan armada yang dikirimkan Mataram ini dapat dihancurkan oleh Belanda. Pada tahun 1643 Belanda melakukan intimidasi dengan mempergunakan armada Jacatra Wachter. Akan tetapi ancaman tersebut disambut Palembang dengan memberikan perlawanan yang hebat terhadap pasukan Belanda yang berkedudukan di Batu Ampar I Ilir. Dalam pertempuran tersebut pihak Palembang berhasil menangkap beberapa serdadu Belanda. Dalam pertempuran ini, pihak VOC banyak mengalami kerugian.

Dalam pertempuran ini, Pangeran Seda Ing Pesarean cedera cukup berat dan karenanya ia digantikan oleh adiknya, Raden Temenggung. Di samping itu karena gagal mendapat bantuan dari Mataram maka kedudukan Palembang semakin tertekan. Akibatnya dengan terpaksa Sultan menandatangani kontrak penjualan lada dengan Belanda dibawah pimpinan Jeremias van Bliet. Perjanjian ini merupakan keuntungan besar bagi Belanda. Tetapi kemudian secara sepihak Palembang memutuskan hubungannya dengan Belanda dan dengan tegas melarang Belanda datang ke Palembang. Bahkan untuk menolak monopoli Belanda, Palembang menaikkan harga lada dan selanjutnya Palembang menjual lada itu kepada pedagang Cina. Karena tindakan tersebut Belanda di Batavia mengajukan protes kepada Sultan Palembang.

Karena merasa dirugikan, kapal-kapal Belanda menghadang kapal/perahu Inggris dan Cina. Belanda berhasil merampas sebuah wangkang di Sungai Musi, persis di depan Kota Palembang. Tindakan tersebut membuat Palembang marah sehingga perang antara Belanda dengan Palembang tak dapat dihindari lagi. Pada tahun 1659 armada Belanda dibawah pimpinan Laksamana van

Der Laan menggempur Palembang. Berkat gempuran hebat, pertahanan Palembang yang terletak dekat Muara Plaju dan Pulo Kembara dapat direbut oleh Belanda. Senopati Palembang gugur bersama putra-putranya. Selanjutnya pasukan Belanda yang memperoleh angin kemenangan dengan ganas membakar rumah-rumah penduduk yang ditinggalkan. Akhirnya Belanda berhasil menemukan kembali serdadunya yang ditawan oleh pasukan Palembang di dekar kraton. Mereka sudah mati menyedihkan dalam pasungan. Melihat keadaan tersebut sebagai balas dendam, Belanda membumihanguskan Kota Palembang Lama sampai menjadi abu.

Setelah kejadian tersebut, pada awal abad XVIII pengaruh Belanda atas Palembang makin tampak kuat. Hal ini dapat dilihat dari peran yang dilakukan Belanda kemudian. Mereka secara paksa menawarkan jasa sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara Palembang - Jambi - Johor. Tawaran tersebut sebenarnya mempunyai tujuan, terutama dalam kepentingan perdagangan lada di daerah ini. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa perseteruan ketiga raja Melayu ini telah memberi peluang pada Belanda untuk lebih cepat menanamkan pengaruhnya di Palembang. Belanda telah lama menginginkan untuk monopoli perdagangan di daerah ini.

Perselisihan antara Palembang dan Jambi, sebenarnya telah lama berlangsung. Permasalahan ini sebenarnya timbul karena memperebutkan daerah Tembesi. Pada masa Ki Gedeng Suro daerah ini diberikan sebagai hadiah atas perkawinan putri tunggalnya dengan putra Jambi. Tetapi tempat ini kemudian banyak didiami oleh orang Palembang, padahal tempat ini termasuk dalam wilayah Jambi, sehingga akhirnya lebih dekat ke Palembang. Perselisihan terus berkepanjangan dan masalah ini merupakan kesempatan baik bagi Belanda untuk menanamkan politik adu dombanya yang seolah-olah mereka datang sebagai dewa penolong.

Permainan licik Belanda semakin tampak sewaktu dalam masa pemerintahan Sultan Mansur. Dalam masa ini timbul perselisihan

antara putra-putra Sultan Mansur, yaitu antara Pangeran Adipati dan adiknya Pangeran Wijayakrama atau lebih dikenal Raden Lembu. Karena perselisihan ini tak dapat diselesaikan dengan baik, maka Sultan Kamaruddin (saudara Sultan Mansur) terpaksa minta bantuan pada Belanda (VOC).

Dengan dalih keamanan dan keselamatan kerajaan, Belanda turun tangan dengan mengirimkan sebuah ekspedisi dengan kekuatan 6 buah kapal dan beberapa buah perahu kecil dibawah pimpinan Willem Daams. Ekspedisi Belanda tersebut menyebabkan Pangeran Dipati atau Pangeran Anom melarikan diri, sedangkan Sultan Komaruddin terpaksa menyerahkan tahta kepada Pangeran Jaya Wijayakrama. Pangeran ini kemudian kawin dengan putri Kamaruddin, dan ia adalah putri Kamaruddin satu-satunya. Setelah dinobatkan, Pangeran Jaya Wijayakrama bergelar Sultan Mahmud Badaruddin I.

Sebagai imbalan pengangkatan Sultan Badaruddin, Belanda menyodorkan suatu kontrak baru untuk ditandatangani yang telah dipersiapkan oleh Abraham Patras. Kontrak tersebut memperbaharui persetujuan-persetujuan sebelumnya sebagai dasar untuk pembayaran kembali semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Kompeni. Dengan demikian pengaruh Belanda di daerah ini semakin kuat dan karenanya keuntungan pun terus mengalir masuk ke kantong Belanda. Dengan dasar kontrak tersebut, Belanda berhasil menguasai perdagangan lada dan menguasai tanah di Bangka. Untuk melancarkan perdagangan VOC, Belanda mendirikan loji di tepi kanan, Sungai Musi, dan letaknya berhadapan dengan keraton. Kedudukan loji ini, langsung berada di bawah kantor cabang Batavia.

Setelah peristiwa ini, kedudukan dan kekuasaan raja-raja Palembang semakin merosot dan sebaliknya kedudukan Belanda semakin bertambah kuat. Berarti pengaruh Belanda pun semakin besar. Setiap ada persoalan yang timbul di dalam negeri Kerajaan Palembang Belanda selalu ikut campur, bahkan Belanda dapat menentukan siapa yang akan duduk di tahta kerajaan. Tegasnya Belandalah yang menentukan, siapa yang akan menjadi Sultan Palembang. Seperti yang telah terjadi atas pengangkatan Sultan

Mahmud Badaruddin I dan kemudian diikuti pengangkatan sultan-sultan Palembang lainnya.

Kekuasaan VOC di daerah ini makin tampak jelas seperti yang tertuang dalam kontrak dengan Sultan tahun 1681 dan tahun 1722 yang antara lain berisi pedagang-pedagang asing berada dibawah pemerintahan dan peradilan kepala tertinggi Kompeni. Dengan demikian sejak saat itu, peranan Syahbandar di daerah ini tidak berarti lagi.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pegawai VOC untuk memperkaya diri dengan melakukan penyelewengan-penyelewengan dan korupsi. Tekanan dan campur tangan Belanda semakin terasa di kalangan kraton, terutama di kalangan keluarga raja. Sebagai akibatnya rakyat di kota dan juga di pedalaman semakin merasakan tekanan berat.

Perubahan politik di Eropa telah membuat persetujuan hebat antara Belanda - Inggris, terutama perebutan kekuasaan atas daerah seberang lautan. Persetujuan tersebut telah memberi kesempatan baik bagi Sultan Palembang Sultan Mahmud Badaruddin untuk bertindak. Tampilnya Sultan Mahmud Badaruddin, bukan saja untuk menegakkan kembali kedaulatan Kesultanan Palembang, tetapi juga dapat menyulut api permusuhan antara Belanda dan Inggris.

Pada bulan Desember 1810 Raffles diangkat menjadi wakil Gubernur Jenderal untuk daerah jajahan, yang berkedudukan di Penang. Raffles kemudian mengirim surat kepada Sultan Baharuddin II, yang isinya meminta agar Sultan mengusir Belanda dari Palembang. Sultan Palembang membalas surat itu dengan sangat hati-hati dan menyatakan bahwa ia berada di luar pertentangan Inggris dan Belanda. Untuk meyakinkan Sultan, Raffles mengirimkan 80 pucuk senapan dan 10 keranjang mesiu sebagai bantuan. Selain itu, ia menjanjikan bantuan militer untuk memperkuat Palembang dalam usaha mengusir Belanda. Lebih jauh Raffles menjanjikan, apabila sultan dapat mengusir Belanda, Inggris akan mengakui Sultan Badaruddin sebagai raja yang berkuasa dan berdaulat penuh.



Meskipun Sultan telah menerima hadiah berupa senjata dari Raffles, tetapi ia tetap netral dan menempatkan dirinya sebagai peninjau. Selain itu Sultan juga mengikuti perkembangan di Jawa, Sultan menempatkan mata-mata untuk mengamati keadaan. Setelah mengetahui, bahwa Belanda telah dapat dipukul Inggris di dekat Jatinegara (Master Cornelis) dan diikuti dengan penyerahan Batavia kepada Inggris, Sultan Palembang segera bertindak menyerang Belanda. Dengan mengerahkan kekuatannya Sultan Badaruddin melucuti tentara Belanda yang berjumlah sedikit itu. Kemudian mereka itu dinaikkan ke perahu dan dibawa ke Muara Sungsang dan semua dibunuh di sana. Begitu juga kantor dagang Belanda dibumihanguskan pada 14 September 1811.

Raffles sebagai penguasa baru tidak mengetahui kejadian ini. Pada tahun 1811 ia mengirim utusan ke Palembang guna membicarakan soal monopoli timah, penyerahan Bangka serta pengambilalihan kantor dagang Belanda. Semua keinginan Raffles itu ditolak keras oleh Sultan. Sultan menyatakan, bahwa ia adalah tuan di dalam rumahnya sendiri dan akan tetap demikian, karena itu utusan Raffles ditolak dan akhirnya pulang dengan tangan hampa.

Tindakan Sultan tersebut menjadi alasan yang kuat bagi Raffles untuk bertindak. Raffles menganggap pembunuhan terhadap orang Belanda itu adalah perbuatan yang tidak bermoral. Untuk menuntaskan permasalahan tersebut, Raffles mengirimkan sebuah ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Gillispie pada 20 Maret 1812 dari Batavia.

Dalam menghadapi serangan tersebut Sultan Badaruddin telah menyiapkan pertahanan dengan membangun benteng di sepanjang Sungai Musi. Kubu-kubu meriam terapung, perahu yang telah siap dipersenjatai, mengisi rakit-rakit dengan bahan-bahan yang mudah terbakar serta memperkuat pertahanan di kraton dengan menempatkan 242 meriam dengan personal yang mahir. Akan tetapi karena penghianatan adiknya sendiri, Pangeran Adipati Najamuddin, Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Kraton Palembang jatuh ke tangan Inggris setelah bertahan selama satu

minggu dan kraton jatuh pada 24-4-1812. Sultan Badaruddin kemudian melanjutkan perlawanan ke daerah pedalaman.

Setelah Gillipsie berhasil mengibarkan bendera Inggris di kraton Palembang, adik sultan yang bernama Najamuddin II ditunjuk menjadi sultan, sebagai imbalannya pada 12 Mei 1812 Sultan Najamuddin II terpaksa menandatangani sebuah perjanjian yang berisi, "supaya sultan menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris". Selanjutnya untuk melumpuhkan perlawanan Sultan Badaruddin yang telah menyingkir ke pedalaman Inggris mengangkat Kapten Meares menjadi Residen Palembang.

Menghadapi perlawanan yang dikobarkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin, Residen Inggris di Palembang melakukan politik cari untung, yaitu mengakui kedudukan kedua bersaudara ini dan berusaha mengembalikan Sultan Mahmud Badaruddin di pusat kerajaan. Meskipun hal ini tidak disetujui oleh Raffles.

Namun terjadi perubahan politik di negara induk. Dalam perjanjian London tahun 1814, Inggris harus mengembalikan Palembang kepada Belanda. Tetapi penyerahan itu baru dapat terlaksana pada 29-6-1817 dan sejak itu Palembang langsung di bawah penguasaan Montinghe sebagai Komisaris Belanda. Pada tahun 1818 ia menyeberang dari Bangka ke Palembang. Sejak itu secara perlahan-lahan Belanda berusaha untuk melepaskan Palembang dari kekuasaan sultan. Belanda memaksa kedua Sultan Palembang untuk menandatangani kontrak seperti pada tahun 1812 dengan Inggris dan secara politis kedua Sultan ini tak berkuasa lagi.

Penyerahan Palembang dari Inggris kepada Belanda agaknya tidaklah diterima begitu saja oleh Raffles. Pada 1818 setelah ia kembali menjadi Residen Bengkulu mengirimkan dua ekspedisi yang terdiri atas 200 - 400 orang untuk merebut Palembang. Pertempuran terjadi antara Inggris - Belanda di Muara Betih dan berakhir dengan perdamaian. Akan tetapi ketika pasukan Belanda akan kembali ke kota tiba-tiba mendapat serangan gencar dari pengikut Badaruddin. Untuk menghindari jatuhnya korban, Muntinghe cepat-cepat menarik mundur pasukannya ke Kota

Palembang. Akibat serangan ini, Muntinghe menuduh Sultan Badaruddin bersekongkol dan telah memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menyerang. Oleh karena itu Belanda menuntut supaya Sultan Badaruddin bertanggung jawab dan sebagai jaminan supaya menyerahkan putra sulungnya. Tuntutan tersebut telah menimbulkan amarah Sultan Badaruddin dan karenanya terjadilah perang yang mengakibatkan Muntinghe terpukul mundur. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Palembang I. Sedang perang Palembang II terjadi lagi pada 22 Agustus 1819 antara Belanda dan Palembang ketika datang bala bantuan dibawah Laksamana Wolterback dengan kekuatan 1.200 marinir. Dalam pertempuran ini Sultan Badaruddin dapat memukul mundur pasukan Belanda di depan Pulau Kembar dan sejak saat itu Palembang merdeka penuh.

Sementara itu, Belanda yang punya keinginan besar untuk menduduki Palembang tidak tinggal diam dan merencanakan serangan berikutnya. Dengan memperlambat keponakan Sultan Badaruddin sendiri dan mensiasati pertahanan Sultan Badaruddin, Belanda kembali melakukan serangan. Dalam serangan ini Belanda mendapat bala bantuan, peralatan serta kapal-kapal perang dari Negeri Belanda dipimpin oleh Jenderal Mayor Baron de Kock dengan kekuatan 47 kapal perang besar, 16 kapal pengangkut tentara, 414 meriam laut, 18 meriam darat, 2586 marinir, 1680 angkatan darat/infantri dan zeni serta didukung oleh kapal-kapal logistik dan perlengkapan lainnya.

Pada 16 Juni 1821 serangan pertama dilancarkan terhadap benteng-benteng pertahanan Sultan Badaruddin. Serangan itu dapat digagalkan oleh Sultan Badaruddin. Setelah 8 hari terjadi pertempuran, kemudian Belanda melakukan serangan secara besar-besaran yang dilakukan dari laut dan darat. Belanda berusaha dengan segala kekuatannya untuk memutuskan perlawanan Sultan Badaruddin. Dengan didukung oleh kecanggihan peralatan yang dimiliki Belanda serta keberhasilan Belanda mempengaruhi Pangeran Prabu Anom, putra sulung Sultan Ahmad Najamuddin II. Sultan Najamuddin juga dibawa dalam penyerangan ini dari Batavia ke Palembang. Berkat petunjuk

Sultan Ahmad Najamuddin dan putranya; Belanda berhasil melakukan serangan lewat belakang, yaitu dari Pulau Kembara. Serangan terakhir ini dapat mematahkan kekuatan Kesultanan Palembang. Tiga hari kemudian, setelah Belanda mengepung dari segala jurusan, serta benteng Sultan Badaruddin, mendapat ancaman dari meriam kapal perahu yang telah siap diarahkan pada pintu kraton, Sultan Badaruddin terpaksa menyerah. Meletusnya perang ini disebut Perang Palembang III.

Pada 6 Juni 1821 Sultan Mahmud Badaruddin dibawa ke Batavia dan dibuang ke Ternate. Sebagai sultan diangkatlah Pangeran Prabu Anom dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III. Tetapi karena dianggap kurang cakap kemudian seluruh kekuasaannya diambil alih oleh Belanda. Kemudian atas usul Komisaris Pemerintahan van Sevenheven seluruh Palembang, Bangka dan Belitung resmi menjadi kekuasaan Belanda.

Kelicikan Belanda baru dapat disadari oleh Sultan Najamuddin III dan karena itu ia berusaha untuk melawan, tetapi sia-sia, karena ia tidak mendapat dukungan dari rakyat Uluu. Dengan demikian habislah riwayat kegigihan Kesultanan Palembang terhadap Inggris dan Belanda. Kesultanan Palembang telah jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, namun daerah Uluu atau pedalaman sebagai pengikut setia Sultan Badaruddin terus memberikan perlawanan secara sporadis. Bersamaan dengan ini bumi dan rakyat jatuh dalam kekuasaan Keresidenan Palembang dan dipimpin oleh Residen berkebangsaan Belanda.

## BAB III

### PROSES MASUKNYA SARIKAT ISLAM DI PALEMBANG

#### *3.1 Masuknya Agama Islam*

Lalu lintas dunia yang melewati tanah air Indonesia datang dari segala jurusan ini telah membawa perubahan besar bagi sejarah bangsa Indonesia. Karena daerah-daerah atau tempat-tempat yang terletak pada urat nadi lalu-lintas ini telah mendapat kontak dengan budaya asing dan hampir dapat dipastikan arus ini telah membawa proses perubahan, baik budaya maupun agama. Perubahan demikian telah terjadi terhadap Palembang yang ketika masa Kerajaan Sriwijaya, agama rakyatnya adalah Budha, tetapi setelah Kesultanan Palembang, agama yang dipeluk rakyatnya adalah Islam.

Kapan masuknya Islam ke Asia Tenggara memang sulit untuk ditentukan secara pasti. Namun demikian dari beberapa catatan dan pendapat-pendapat dan didukung oleh data dari pelbagai sumber, dapat dikatakan bahwa Islam sejak abad ke-1 H telah keluar dari Jasirah Arab dibawa oleh para mubalig. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketika masa kejayaan Sriwijaya Islam telah masuk melalui jalan niaga, meskipun belum mendapat tempat untuk berpijak. Hal ini terjadi karena ketika itu penguasa Sriwijaya sangat berpegang teguh pada ajaran agama Hindu dan Budha.

Dengan melalui jalan niaga tradisional Selat Malaka, agama Islam disebarkan oleh mubalig-mubalig yang datang dari Arab, Parsi dan India. Para mubalig ini untuk sampai ke tujuan melakukan berbagai cara dan satu di antaranya adalah berdagang. Jadi jelasnya untuk menyebarkan agama Islam itu mereka lakukan sambil berdagang.

Pendakwah-pendakwah ini yang terdiri orang Arab, India, dan Parsi terus mendatangi pantai-pantai timur Sumatra dengan menjalankan tugas ganda, yaitu berdakwah sambil berdagang. Dalam menjalankan missinya mereka kadang-kadang menetap dan kawin dengan putri penguasa bandar setempat. Di antara para pendakwah ini ada yang kawin dengan anak-anak orang ningrat, hal itu dilakukan untuk lebih memudahkan penyebaran agama Islam ke rakyat biasa.

Munculnya Perlak, Kerajaan Samudra Pasai dalam abad XII tidak dapat disangkal lagi bahwa Islam telah mendapat tempat berpijak yang kuat di pantai utara Sumatra. Begitu juga lahirnya Malaka yang bercorak Islam pada awal abad 15. Kemudian pada masa berikutnya disusul dengan berdirinya Kerajaan Demak dan Banten ke sebelah barat Jawa. Lahirnya dan berkembangnya negara-negara yang bernafas Islam kemudian telah memberi warna politik terhadap Kerajaan Sriwijaya.

Penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara berlangsung setelah kemunduran Majapahit. Kehadiran Portugis di perairan Asia Tenggara pada permulaan abad ke-16, dan jatuhnya Malaka pada tahun 1511 telah menyebabkan berpindahannya jalur pedagang orang-orang Islam dari Selat Malaka ke Selat Sunda. Hal ini secara tidak langsung mempercepat berdirinya Kerajaan Banten tahun 1527. Selanjutnya penyebaran agama Islam ke daerah Sumatra bagian selatan dari segala jurusan makin intensif. Orang-orang Malaka yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Portugis sebab berlainan agama terpaksa pindah ke daerah lain dan satu di antaranya adalah Palembang. Pemilihan tempat ini adalah karena orang-orang Malaka merasa mempunyai hubungan geneologis dengan orang-orang Palembang.

Proses Islamisasi di Palembang berjalan lancar. Kelancaran ini sebenarnya didukung oleh jatuhnya Sriwijaya, ekspedisi Ming di bawah Cheng Ho, kedatangan Portugis yang membawa misi Perang Salib dan perebutan kekuasaan di Kraton Demak. Palembang sebagai negeri asal Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, mengakui kekuasaan Demak. Selanjutnya Demak menjadi pusat ekspansi Islam ke arah timur dan barat serta bermuara di Palembang.

Islam masuk ke Palembang melalui dua jalur yaitu melalui utara oleh pedagang-pedagang Islam. Palembang disamping sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya juga merupakan bandar transito di Asia Tenggara, karena itu menjadi tujuan pedagang. Sedang dari selatan, Islam dibawa oleh para mubalig yang berasal dari Demak, Banten dan Mataram.

Mengingat sejak lama Palembang menjadi tempat persinggahan, maka diperkirakan pada akhir abad ke-7 atau pada awal abad ke-8 mubalig-mubalig Arab telah menyebarkan Islam di daerah ini, waktu itu mayoritas penduduk beragama Budha Mahayana, sehingga agama Islam belum dapat berkembang. Pada masa ini datang pula armada Cina dibawah dinasti Tang yang bermotif agama dan juga ekonomi. Pedagang Cina tidak mau disaingi oleh pedagang Arab yang Islam. Namun demikian Islam sebagai agama tak dapat dibendung dan akhirnya negeri ini pada abad ke-17 menyatakan dirinya sebagai kerajaan Islam yang merdeka.

Sedang proses Islamisasi di daerah Uluan atau pedalaman berbeda dengan di pusat kerajaan (Palembang). Di daerah ini peranan para mubalig, kyai, guru agama, haji, adalah sangat penting. Selain itu, peranan Sungai Musi dengan anak sungainya Batanghari Sembilan sangat penting artinya dalam penyebaran Islam pada saat itu. Dengan naik perahu para mubalig dari Palembang dapat bergerak sampai ke Muara Beliti, Curup, Musi Rawas dan tempat-tempat lainnya.

Mubalig dari Palembang yang bernama Kyai Marogan H. Abdul Hamid (1825-1890) melakukan penyebaran Islam di daerah MUBA

yang kemudian dilanjutkan oleh Haji Sepuh Jambi. Tugas mulia ini kemudian diikuti oleh murid-muridnya yang bernama Kyai Delamat. Nama yang terakhir ini sangat terkenal di kalangan penduduk Uluan terutama karena jasa-jasanya dalam peng-Islaman daerah ini. Ia dianggap berjasa karena dapat mendirikan masjid di setiap dusun.

Islamisasi di daerah MUBA sebenarnya telah dimulai kira-kira tahun 1682 oleh seorang mubalig yang bernama Bujang Jawe Gelar Mangkubumi yang berasal dari Demak dibantu oleh Penghulu Jalil. Dalam menjalankan missinya selain mengajar agama, ia juga meluangkan waktu untuk mengajar penduduk setempat yang masih hidup berkelompok dalam hutan, tentang bercocok tanam dan mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Sehingga penduduk di daerah tersebut telah mengenal bercocok tanam dan tinggal menetap.

Peng-Islaman daerah OKU dilakukan oleh mubalig yang datang dari Demak dan Banten, yaitu Tuan Umar Baginda, kira-kira tahun 1575. Selanjutnya tahun 1600 ia menuju daerah OKU. Tuan Umar Baginda adalah putra Sunan Gunung Jati. Karena sulitnya komunikasi di daerah pedalaman, maka proses Islamisasi di daerah ini berjalan sangat lamban. Pengislaman daerah ini baru terjadi pada awal abad ke-20.

Selain mubalig tersebut, pada abad ke-17 datang pula mubalig dari Padang bernama Umpu di Padang, Syeikh Muhammad Saman dari Palembang dan pada tahun 1656 H. Juana dari Banten yang kemudian mendirikan Pesantren di Marga Padang Suku II. Pada tahun 1850 di daerah Martapura datang H. Jamaluddin dari Martapura Kalimantan. Daerah paling akhir diislamkan di OKU adalah Muara Dua yaitu antara tahun 1900-1918 dan ini bersamaan dengan kebangkitan syiar Islam. Kebangkitan tersebut merupakan reaksi terhadap pemerintah Belanda yang menganggap bahwa umat Islam tidak bersungguh-sungguh menjalankan perintah agamanya.

Sedang Islamisasi di daerah LIOT berdasarkan tulisan di atas kayu yang diketemukan di dusun Muara Danau Semendo yang dilakukan kira-kira tahun 1311. Kemudian pada tahun 1395 dua



orang mubalig, yaitu Syeikh Mahmud dan Syekh Alam Raja Kuasa Kute Talang Gumilang Ayek Lematang datang menyiarkan Islam di daerah ini. Selain itu, kira-kira tahun 1342 dua orang ulama mendirikan 40 pondok yang terletak kira-kira 3 KM dari Muara Enim. Tempat ini dijadikan pusat pendidikan agama Islam. Ulama yang berjasa itu adalah Syekh Jalil Cakrabirawa dan temannya Ahmad Mahmud.

Islamisasi di daerah Lahat diperkirakan baru terlaksana dalam abad ke-17, yaitu sejak Talang Tumeten Tujuh diresmikan menjadi Perdipo yang kemudian berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di daerah Pagar Alam dan daerah lain di seluruh Lahat. Mubalig yang terkenal adalah Baharuddin Nuryakin bergelar Puyang Awak yang berasal dari Jawa.

Sementara itu Islamisasi di daerah Bangkalan Belitung dilakukan oleh mubalig dari Johor. Pengaruh Islam masuk ke daerah ini pada abad ke-16 yang dibawa oleh Tuan Serah. Kemudian ia mendapat kepercayaan menjadi Wakil Sultan Johor di Bangka. Pada abad ke-17 orang Arab yang bernama Nukhada Sulaiman dan Qari yang berasal dari Batusangkar mendirikan masjid di Muntok. Sedang mubalig Syekh Abu Bakar alias Sayid Hasan dari Pasai berhasil mendirikan mesjid yang pertama di Belitung.

Palembang sebagai pusat kerajaan memegang peranan penting dalam penyebaran Islam ke daerah pedalaman. Penetrasi Islam di daerah ini telah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya dan kehidupan kenegaraan khususnya. Meskipun pada mulanya Islam hanya tersebar di kalangan pedagang-pedagang dan tingkatan atas masyarakat kerajaan, tetapi akhirnya dapat diakui sebagai agama negara pada abad ke-17. Puncak kegemilangan Palembang sebagai Kerajaan Islam yang berdaulat adalah pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman atau Jamaluddin Sultan Candi Walang yang memerintah tahun 1662-1706.

Untuk melancarkan roda pemerintahan, kaum ulama dirangkul dan diikutsertakan dalam pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, hukum Islam turut mendampingi hukum adat. Masjid dan langgar dibangun di setiap pelosok dan dijadikan pusat-

pusat pendidikan agama, sehingga dengan demikian Islam betul-betul memegang peranan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah maupun pusat kerajaan.

Dinyalakkannya Islam sebagai agama resmi kerajaan berarti para mubalig telah mendapat dukungan moril dari sultan terutama dalam peng-Islaman daerah pedalaman. Karena itu para mubalig dengan leluasa dapat berlayar ke udik dan memasuki tali-tali sungai menuju daerah Uluan. Tanpa mengharap imbalan mereka mengajar penduduk membaca Al-Qur'an, shalat dan hukum-hukum agama. Selain itu mereka mengajak penduduk untuk membangun langgar dan masjid sebagai tempat shalat dan menjadi pusat pendidikan serta untuk mendalami Ilmu Agama. Oleh karena itu pada awal abad ke-20 seluruh penduduk daerah pedalaman menjadi muslim. Bahkan di kalangan orang-orang yang mampu, dapat menunaikan rukun Islam yang ke-5 dan mereka itu ada yang tinggal di Mekah beberapa lama untuk memperdalam pengetahuan agama. Setelah kembali mereka mengamalkan ilmunya untuk kepentingan umat Islam. Sehingga pengaruh Islam di kalangan masyarakat makin besar. Dan agama Islam dapat dijadikan alat ampuh dalam menentang penjajah yang dianggap kafir.

Kefanatikan pada agama inilah agaknya yang telah membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan oleh Belanda, daerah Uluan yang dipimpin oleh pangeran-pangeran masih tetap mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda. Kefanatikan kepada agama sejalan dengan semangat perlawanan terhadap Belanda yang dianggap kafir. Di daerah Uluan rakyat bahkan melakukan perlawanan dengan melakukan perang gerilya.

### ***3.2 Sarikat Islam Pembangkit Semangat Persatuan***

#### **3.2.1 Berdirinya Sarikat Islam**

Pada tahun 1911 di Surakarta berdiri sebuah perkumpulan yang diberi nama *Kong Sing*. Anggota perkumpulan tersebut terdiri atas dua golongan, yaitu golongan orang-orang Jawa dan orang-

orang Cina. Perkumpulan ini merupakan organisasi, koperasi, dengan tujuan untuk menjalin bekerja sama di antara anggotanya dalam bidang usaha, terutama untuk melakukan pembelian dan penjualan batik, serta kerjasama dalam urusan kematian.

Pada mulanya perkumpulan ini dapat berjalan dengan baik, tetapi kemudian terjadi perpecahan, sebab anggota golongan Cina yang semula hanya 50 persen berkembang menjadi 60 persen. Akibatnya lebih jauh, mereka tampak berambisi hendak menguasai perkumpulan tersebut dan mereka ingin menyingkirkan para anggota dari golongan bumiputera. Selain itu, sikap orang-orang Cina menjadi lebih sombong dengan berhasilnya revolusi Cina yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat Sen.

Melihat sikap Cina yang makin menjadi sombong itu, para anggota orang Jawa beranggapan, bahwa keluar dari *Kong Sing* adalah langkah yang tepat. Berangkat dari masalah itu maka mereka keluar dari organisasi tersebut, yang kemudian mereka membentuk perkumpulan baru dengan nama Sarekat Dagang Islam.

Sarikat Dagang Islam didirikan pada 1911 di Solo oleh seorang pengusaha batik di Laweyan Solo yang bernama Haji Samanhudi. Dasar organisasi ini adalah, agama, yaitu Islam dan dasar ekonomi. Kecuali untuk memajukan agama, juga untuk memperkuat diri dari golongan Cina, seperti yang telah disebut di atas. Di Solo pedagang-pedagang Cina pada waktu itu memegang peranan penting dalam pengadaan bahan-bahan yang diperlukan oleh perusahaan batik. Dengan mendirikan Sarikat Dagang Islam Haji Samanhudi dan kawan-kawannya mengharap dapat memajukan para pengusaha pribumi (Jawa).

Ide penndirian SDI ini sebenarnya adalah atas dorongan RM. Tirtohadisuryo, mahasiswa STOVIA yang putus kuliah, tetapi kemudian aktif dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya untuk memajukan bangsa ia menerbitkan surat kabar dan mendirikan NV. Sarikat Dagang Islamiyah di Bogor tahun 1910. Kedua tokoh ini, Haji Samanhudi dan RM Tirtohadisuryo telah bekerjasama sejak lama dalam usaha penerbitan Surat Kabar *Medan Priyayi*.

Jadi boleh dikatakan SDI merupakan peluasan SDI Bogor, sehingga SDI Solo mendapat sambutan dan lebih mencuat ke permukaan. Adapun tokoh-tokoh lain yang turut aktif dalam pendirian SDI, adalah Sumowardoyo, Harjosumarto, Martodikoro, Wirjotirto, Sukir, Suwandi, Suropranoto dan Jerman.

Pada tahun 1912, Umar Said Cokroaminoto, seorang tokoh yang enerjik, dan bekerja pada sebuah perusahaan dagang di Surabaya mengusulkan kepada Haji Samanhudi agar perkumpulan tersebut jangan membatasi diri pada golongan pedagang saja, tetapi diperluas, khususnya kepada umat Islam. Dengan alasan tersebut, maka kata-kata dagang dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut dihapus. Sehingga nama perkumpulan dalam akte notarisnya 10 September 1912 itu menjadi Sarikat Islam (SI).

Menurut anggaran dasar, tujuan Sarikat Islam adalah :

1. Memajukan perdagangan
2. Memberikan pertolongan kepada para anggota yang mendapat kesukaran
3. Memajukan kepentingan jasmani dan rokhani kaum bumi putra
4. Memajukan kehidupan Islam

Selanjutnya Sarikat Islam juga bertujuan :

- a. Menyusun masyarakat Islam, agar bisa hidup berkumpul menjadi saudara
- b. Menggerakkan hati orang Islam supaya bersatu dan bertolong-tolongan
- c. Di dalam lingkungan dan batas undang-undang negara, melakukan segala daya upaya untuk mengangkat derajat rakyat, guna kesentausaan dan kemakmuran tumpah darahnya.

Dari tujuan di atas jelaslah bahwa Sarikat Islam bergerak dalam bidang sosial, bukan dalam bidang politik. Tindakan ini

diambil disesuaikan dengan peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang tertuang dalam *Regering Reglement* artikel III yang melarang keras organisasi-organisasi atau perkumpulan yang bersifat politik.

Meskipun belum mendapat pengesahan dari pemerintah tentang anggaran dasar Sarikat Islam, tetapi SI terus mengadakan propaganda dan mendapat sambutan yang luas dari rakyat. Adapun yang menjadi perhatian SI adalah membela penderitaan rakyat, yaitu menyangkut gaji buruh, sewa menyewa tanah dan perdagangan. Dengan jalan ini SI berkembang sangat cepat. Dalam waktu singkat Serikat Islam Batavia saja telah mempunyai anggota sebanyak 12.000 orang.

Dengan mencantumkan Islam sebagai dasar rupanya telah menjadi daya tarik yang kuat, sehingga berhasil menarik banyak anggota dari kalangan rakyat. Dalam waktu yang relatif singkat SI telah meluas menjadi perkumpulan yang banyak anggotanya.

Meskipun SI berkembang pesat, namun tidak berarti tanpa hambatan. Hambatan tersebut khususnya datang dari Pemerintah Hindia Belanda, yang telah melihat bahwa SI akan menjadi perekat dalam membentuk persatuan. Sehubungan dengan itu, karena kekhawatirannya, mereka melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah para tokoh-tokoh Sarikat Islam.

Untuk mengantisipasi hambatan dari Pemerintah Hindia Belanda tersebut, Sarikat Islam melaksanakan kongresnya yang pertama di Surabaya. Kongres ini berlangsung pada 25-26 Januari 1913 di Gedung Taman Manikam Surabaya. Pesertanya berjumlah sekitar 8.000 sampai 10.000 orang yang terdiri atas utusan dari SI Jawa Tengah, Jawa Timur, utusan golongan, peninjau dan pejabat bumiputra.

Adapun hasil yang dicapai dalam kongres tersebut adalah:

1. Sarikat Islam menetapkan peraturan yang sama bagi semua cabang
2. Sarikat Islam menetapkan bahwa Sarikat Islam ialah suatu organisasi yang mempunyai wilayah segenap Hindia Timur

(sebutan untuk Indonesia), dan yang dapat menjadi anggota SI adalah orang Islam yang terkenal baik adat perlakuannya.

Pada daerah yang jumlah anggotanya memenuhi kriteria untuk mendirikan cabang dapat mendirikan cabang tersendiri dan memilih pengurusnya. Cabang-cabang bersatu dalam satu departemen. Departemen Sarikat Islam Jawa Barat dipimpin oleh beberapa orang pengurus dan wilayahnya meliputi Jawa Barat, Sumatra, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Departemen Sarikat Islam Jawa Tengah berkedudukan di Surakarta, sedang Departemen Sarikat Islam Jawa Timur dipimpin oleh Pengurus Besar Jawa Timur berkedudukan di Surabaya dengan wilayah meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, dan Sumbawa.

Segenap organisasi Sarikat Islam Hindia Timur itu dikemudikan oleh Central Comite Sarikat Islam Hindia Timur dan berkedudukan di Surakarta. Central Comite adalah badan tertinggi dalam Sarikat Islam dan bertanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar. Anggota Central Comite dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh cabang-cabang.

Pemerintah Hindia Belanda, yang sejak semula telah mencurigai kehadiran Sarikat Islam sebagai suatu badan perkumpulan anak bumiputra yang akan mengganggu kelangsungan kekuasaannya makin kuat sak wasangkanya. Untuk menghambat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Sarikat Islam, Pemerintah Hindia Belanda, dengan tegas menolak permintaan Sarikat Islam untuk dapat berbadan hukum sebagai suatu perkumpulan yang utuh. Namun demikian untuk menarik hati Sarikat Islam, Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada hak hidup Sarikat Islam lokal dan kepadanya diberikan badan hukum sendiri-sendiri. Dengan demikian Sarikat Islam menjadi suatu perkumpulan lokal yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai kaitan antara satu dengan lainnya.

Berangkat dari pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Sarikat Islam lokal, maka semua cabang Sarikat Islam lokal yang telah berdiri meminta pengakuan dari pemerintah, sehingga sampai tahun 1914, telah 56 perkumpulan Sarikat Islam lokal yang diakui oleh pemerintah.

Kemudian untuk mengukuhkan kedudukan Sarikat Islam, Pengurus Sarikat Islam sentral berusaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai sentral yang beranggotakan Sarikat Islam lokal. Jadi Sarikat Islam lokal duduk sebagai anggota dari anggota Sarikat Islam Sentral. Dengan taktik demikian Sarikat Islam Sentral dapat memperoleh badan hukum dan ini dimuat dalam keputusan 18 Maret 1916. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa pengurus Sentral Sarikat Islam diwajibkan mengawasi tindak-tanduk pengurus dan anggota Sarikat Islam lokal.

Tindakan demikian diambil oleh pemerintah dengan maksud agar Sarikat Islam Sentral dapat melakukan pengawasan terhadap Sarikat Islam lokal. Adapun pengurus pertama dari Sarikat Islam Sentral adalah Umar Said Cokroaminoto sebagai ketua, dan sebagai wakil ketua adalah Abdul Muis dan Haji Gunawan. Ada pun Haji Samanhudi diangkat sebagai Ketua Penghormatan.

Bukti meluasnya gerakan Sarikat Islam terlihat pada kongres pertama yang diselenggarakan pada bulan Juni 1916 di Bandung. Dalam kesempatan tersebut 80 Sarikat Islam lokal mengirimkan utusannya, dengan peserta hampir mencapai 360.000 orang. Kongres ini telah menghasilkan istilah nasional, Sarikat Islam dengan tegas menyatakan supaya penduduk asli Indonesia menjadi satu natie, satu bangsa. Dengan demikian Sarikat Islam telah berani menyatakan cita-citanya, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa.

Dalam kongres Sarikat Islam kedua yang diadakan tahun 1917 di Jakarta sudah tampak pengaruh aliran baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu aliran revolusioner sosialistis. Dalam kongres kedua ini ditegaskan bahwa tujuan akhir Sarikat Islam adalah pemerintahan sendiri, tetapi belum berani mempergunakan kata-kata "merdeka". Dalam kongres ini ditentukan pula calon wakil Sarikat Islam yang akan duduk dalam Volksraad, yaitu Umar Said Cokroaminoto dan Abdul Muis.

Demikianlah dalam tahun-tahun selanjutnya, Sarikat Islam tak dapat dibendung dan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota menjadi 450.000 orang tersebar dalam 87 Sarikat Islam

lokal dan mengirim wakilnya ke kongres Sarikat Islam III ke Surabaya tahun 1918. Dalam kongres ini telah dipertentangkan antara penjajah kontra terjajah, antara kapitalis kontra buruh.

Sebagai akibat adanya pencetusan pertentangan tersebut di atas, maka dalam kongres Sarikat Islam III dinyatakan perlunya mengorganisasi dan menyusun kekuatan kaum buruh dan tani. Dalam kongres ini juga ditegaskan bahwa Sarikat Islam menuntut perluasan pengajaran, penghapusan kerja paksa untuk negara, yaitu pajak tidak berupa uang, tetapi berupa tenaga yang diberikan oleh penduduk di desa-desa kepada pemerintah.

Sementara itu, Umar Said Cokroaminoto dan Abdul Muis yang telah duduk di Volksraad mulai ikut bicara. Sebagai wakil dari fraksi Sarikat Islam mereka mendesak kepada pemerintah agar segera dibentuk parlemen. Mereka menuntut supaya Volksraad itu kedudukannya bukan hanya sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah tetapi berperan sebagai badan legislatif atau wakil rakyat sesuai dengan kedudukan parlemen.

Selain itu, diusulkan pula oleh fraksi Sarikat Islam bahwa yang duduk di dalam parlemen itu bukan hanya wakil-wakil organisasi politik, tetapi juga wakil golongan-golongan yang tergabung dalam organisasi politik dan golongan fungsional.

Pada awal tahun dua puluhan grafik perjalanan hidup Sarikat Islam tampak semakin berani dan terus meningkat. Perjuangan Sarikat Islam telah dapat menyentuh segala sendi kehidupan rakyat yang tertindas oleh tirani Belanda, yang tersebar luas di seluruh pelosok nusantara. Kehadiran Sarikat Islam, sebagai badan perkumpulan telah memberi kesempatan kepada rakyat, yang kala itu disebut *bumiputra* untuk turut bergabung menghusung panji-panji suci sebagai lambang persatuan. Tokoh-tokoh Sarikat Islam memberikan perlawanan, bukan angkat senjata, tetapi melalui angkat bicara. Mereka itu, seperti Umar Said Cokoaminoto yang terkenal sebagai orator ulung mampu berdiri di mimbar-mimbar, di hadapan rakyat banyak untuk membangkitkan semangat rakyat. Sikap berani seperti ditunjukkan oleh Sarikat Islam itu telah mengagetkan Belanda yang duduk di kursi keangkuhannya.



Sehingga terpaksa berfikir keras mencari jalan untuk dapat memadamkannya. Akan tetapi mereka (Belanda) belum dapat menemukannya, biarpun merenung dalam gelap buta, hanya terletak dalam benak mereka seperti lagu lama, yaitu tumpas dengan kekerasan larang semua kegiatan dan kalau perlu tangkap tokoh-tokohnya. Bereslah kedudukan kuat kembali: itulah taktik dan politik penjajah Belanda kala itu.

Sementara itu pemimpin Sarikat Islam yang duduk di *Volksraad* bukan hanya duduk enak kemudian mendapat gaji, tetapi mereka berusaha menjadi juru bicara yang vokal dalam menyampaikan jeritan hati nurani rakyat yang tertindas. Mereka minta agar pemerintah memperhatikan nasib rakyat dengan antara lain membentuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Satu perjuangan Sarikat Islam pada awal tahun dua puluhan adalah membentuk Sarikat Islam sekerja yang dinamakan sentral sarikat sekerja. Seorang tokoh SI bernama RM. Sosrokartono, berhasil membentuk badan sarikat yang beranggotakan, Sarikat Sekerja pegadaian, Sarikat Sekerja Pabrik Gula dan Sarikat Sekerja Kereta Api.

### **3.2.2 Berdirinya Sarikat Islam di Palembang**

Berdirinya Sarikat Islam menjadi perkumpulan yang besar itu dapat dipandang sebagai suatu pertanda telah bangkitnya masyarakat bumiputra di Hindia Belanda yang ingin memperoleh pembaharuan dalam segala bidang kehidupan. Sarikat Islam tumbuh dan terus meluas menjadi perkumpulan besar dengan jumlah anggotanya yang banyak. Anggota-anggotanya bukan saja datang dari kalangan terbatas, yaitu para pedagang seperti pada awal berdirinya, tetapi telah terbuka luas bagi pegawai dan buruh. Dengan demikian Sarikat Islam sudah menjadi organisasi rakyat, sehingga tidaklah mengherankan, apabila SI selalu mendapat sambutan yang hangat, teristimewa dalam masyarakat yang bernafaskan agama Islam.

Demikian pula keadaan di Palembang, Sarikat Islam tumbuh di Palembang dibawa oleh tokoh-tokoh dari Jawa melalui Lampung. SI dapat berkembang secara cepat karena para tokohnya merasa mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air. Mereka tidak mengenal lelah, dan tanpa mengharapkan balas jasa, menjalankan tugas ini *lillahi ta'ala*, karena Allah.

Mengikuti aturan-aturan yang telah digariskan Sarikat Islam, maka setiap tempat atau daerah apabila anggotanya sudah dianggap cukup boleh mendirikan suatu cabang dan memilih pengurusnya masing-masing. Pada setiap cabang dibagi dalam beberapa ranting dan di setiap ranting dibagi lagi menjadi beberapa anak ranting atau kelompok. Dan sejalan dengan keputusan Kongres Pertama Sarikat Islam, Cabang Sarikat Islam Jawa Barat dan daerah di Sumatra dan pula-pulau kecil di sekitarnya menjadi satu departemen dan departemen ini dinamakan Departemen Sarikat Islam Jawa Barat, dibawah pimpinan Pengurus Besar Jawa Barat.

Ada sementara pendapat bahwa Sarikat Islam masuk Palembang melalui Lampung pada tahun 1911 dibawa oleh RM. Tirtohadisuryo dan R. Gunawan. Kalau ini benar, berarti Sarikat Islam yang masuk ke Palembang berasal dari Sarikat Dagang Islam Bogor. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa atas jasa dan usaha mereka inilah Sarikat Islam berdiri di Palembang.

Rapat pembentukan Sarikat Islam di Palembang yang pertama sekali berlangsung di Gedung Wayang Abdul Somat Yusuf Co Taman Sumatra Indra Bangsawan of Palembang yang lebih dikenal dengan nama *Gedung Seng*, yang sekarang disebut gedung bioskop REX terletak di daerah Sungai Tawar Palembang. Tokoh tokoh Sarikat Islam Palembang pada waktu itu antara lain adalah Raden Nangling dan M. Wahyu, seorang pokrol. Raden Nangling menjabat sebagai ketua atau Presiden Sarikat Islam Lokal untuk Kresidenan Palembang.

Berdirinya Sarikat Islam di daerah ini adalah karena adanya perubahan sikap politik dari pemerintahan Hindia Belanda terhadap daerah jajahan. Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi

bersikap curiga dan tidak menghalangi perkembangan Islam. Begitu juga rakyat, setelah terhapusnya kekuasaan Kesultanan Palembang, sikap perjuangan rakyat yang keras mulai meluntur. Jelasnya sikap rakyat mengalami perubahan, mereka tidak lagi melakukan perlawanan dengan kekerasan atau mengangkat senjata. Namun demikian api perlawanan belumlah padam, dalam hati rakyat masih terpendam kebencian, mereka masih ingin mengusir penjajah Belanda yang dianggapnya kafir. Karena itu ruang gerak dan fasilitas yang ditawarkan Sarikat Islam yang mengacu pada adat masyarakat dan berdasar agama Islam telah membangkitkan semangat dan harapan untuk dapat mengembalikan kejayaan Islam seperti pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin II.

Sedang pada sisi lain, mengapa Sarikat Islam dengan mudah dapat diterima masyarakat di Palembang? Jawabnya adalah karena, pertama masyarakat Palembang adalah pemeluk agama Islam dan pernah berjaya dalam Kesultanan Palembang, sedang yang kedua karena sejak Belanda berkuasa keadaan umat Islam menjadi mundur di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali daerah Palembang. Walau pun sebenarnya kemunduran Islam ini antara lain disebabkan oleh timbulnya perselisihan sesama umat Islam sendiri.

Sarikat Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat Palembang karena umat Islam di sini sudah jenuh dengna adanya pertenggaran faham. Pada umumnya mereka berbeda pendapat dalam masalah *khilafiah* dan *kurafah* (tahyul). Pada saat itu sebagian besar masyarakat masih percaya pada *kurafah*. Namun dalam perkembangannya banyak orang-orang Palembang mengubah gaya hidup masyarakat terutama kalangan atas. Kemudian kehidupan yang pergi ke Mekah untuk ibadah haji dan bahkan ada yang menetap di Mekah, terutama untuk memperdalam ilmu agama. Sehingga setelah kembali ke tanah air, mereka bukan saja sebagai haji, tetapi mampu menjadi seorang mubalig yang dapat menyiarkan ajaran Islam, sehingga para pengikutnya dapat memahami dengan baik tentang ajaran Islam. Pemahaman inilah kemudian yang membuat timbulnya pertentangan di dalam kalangan umat Islam sendiri.

Lahirnya pertentangan itu, karena umat Islam yang telah mendapat pengetahuan luas tentang Islam berusaha untuk meluruskan ajaran Islam kepada proporsi yang sebenarnya, yaitu kembali kepada ajaran Nabi Muhammad yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al Hadist. Bahkan, untuk memurnikan ajaran Islam itu, kaum muda aktif berperan dalam memberantas taqliq bid'ah dan khurafat.

Di pihak lain, yang disebut kaum tua, yaitu golongan masyarakat Islam yang tradisional yang masih terikat pada ajaran leluhurnya, dalam menjalankan Islam masih berpegang pada adat kebiasaan lamanya. Artinya kaum tua masih tetap bergelut dalam bidah dan khurafat.

Pertentangan antara kaum tua dan kaum muda terjebak dalam perdebatan yang seru dan tidak berkesudahan. Mereka saling mengkafirkan, kaum tua menuduh kafir kaum muda dan sebaliknya kaum muda menganggap kafir kaum tua. Pertengkaran faham ini tiada berkesudahan, sehingga nasib umat Islam semakin tenggelam dan tidak mendapat perhatian dari umat Islam sendiri, terutama para tokoh atau para pemimpinnya. Karenanya tidak mengherankan umat Islam Indonesia, daerah Palembang khususnya menjadi kuda tunggangan yang baik bagi penjajah Belanda.

Pertentangan faham itu telah dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memperkuat kedudukannya. Belanda menjadi penonton yang baik, dan membiarkan umat Islam itu cakar-mencakar. Bahkan kalau penting mereka berusaha untuk terus menjadi penonton dengan menghembus-hembuskan benih perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan harapan mereka akan meraih keuntungan di atas reruntuhan umat Islam.

Kesemua itu masalah tersebut telah menjadi lahan yang tepat bagi hidupnya Sarikat Islam di daerah Palembang. Kehadiran Sarikat Islam di Palembang di bawa oleh R. Gunawan dan dibentuknya organisasi tersebut telah menjadi mitos, seperti datangnya juru selamat di dalam masyarakat atau umat Islam yang telah larut dalam perselisihan faham.

**Karenanya mobilitas Sarikat Islam terus bergerak dari suatu daerah ke daerah lain, berjalan ke seluruh penjuru dan pelosok untuk mencari lahan yang subur sampai ke daerah Uluan atau daerah pedalaman. Para tokoh Sarikat Islam daerah ini dengan cerdas dapat memobilisasi umat Islam untuk menjadi anggota. Sehingga dengan cepat telah berdiri cabang-cabang Sarikat Islam bahkan sampai ke ranting-rantingnya.**

**Selain itu, dapat diterimanya Sarikat Islam, sebenarnya tidak terlepas dari missi Sarikat Islam, yang salah satunya adalah untuk memajukan umat Islam. Namun bagi masyarakat di daerah Palembang diterimanya Sarikat Islam, bukan saja karena memajukan umat Islam, tetapi adalah merupakan reaksi terhadap politik kristinisasi dari missioner agama Nasrani. Masalah inilah agaknya yang telah memacu mobilitas Sarikat Islam sampai ke seluruh pelosok dan penjuru daerah Palembang.**

## BAB IV

### MOBILITAS SARIKAT ISLAM DI KARESIDENAN PALEMBANG

Gema Sarikat Islam menggeleгар dahsyat di angkasa raya, menyebar ke seluruh penjuru Kepulauan Nusantara, membangkitkan rakyat tertindas, terutama umat Islam untuk bersatu dan memberikan “perlawanan” terhadap Pemerintah kolonial Belanda. Mengikuti gema itu, sejak tahun 1911 Sarikat Islam telah masuk daerah Palembang yang dibawa oleh seorang tokoh SI bernama Raden Gunawan. Dengan mobilitas yang tinggi, Raden Gunawan dapat menembus sekat-sekat yang telah diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan sebutan politik pecah belah (*devide et empera*). Berangkat dari kepiawaiannya sebagai seorang propagandis yang bijak, ia berhasil memobilisasi massa untuk bangkit dan mendirikan Sarikat Islam di seluruh pelosok daerah Karesidenan Palembang. Kehadiran Sarikat Islam menjadi tumpuan harapan menghimpun kekuatan untuk memberikan reaksi terhadap Pemerintah kolonial Belanda.

Sehubungan dengan itu, tidaklah meherankan bila Sarikat Islam merupakan sebuah pilihan yang harus didukung oleh umat Islam. Karenanya umat Islam baik kalangan atas maupun lapisan bawah turut aktif untuk menyambutnya. Keberhasilan Sarikat Islam menaklukkan hati umat Islam, sebenarnya tidaklah terlepas

dari konsep yang ditawarkan yaitu solidaritas, persaudaraan dan persatuan. Kesemua itu merupakan unsur pemersatu umat Islam yang selanjutnya bermuara pada bangkitnya perjuangan rakyat melawan pemerintahan kolonial Belanda.

Agaknya merupakan suatu keajaiban, karena kedatangan Sarikat Islam di daerah ini, bukan saja disambut dan diterima oleh kalangan masyarakat asli (pribumi), melainkan juga telah mendapat simpati dan tanggapan dari golongan masyarakat Timur Asing yang berdomisili di daerah ini seperti orang Arab, orang India dan orang-orang Cina. Golongan yang disebut terakhir ini secara ekonomis adalah orang yang memegang dan menentukan neraca ekonomi di daerah Palembang. Berbeda dengan di Jawa, di Karesidenan Palembang antara golongan pribumi (penduduk asli) dengan orang-orang Cina terlihat adanya saling pengertian dan mereka dapat bekerja sama, meskipun saat itu masih ada anggapan tabu proses asimilasi.

Demikianlah, berkat peran aktif Raden Gunawan dan sambutan hangat dari tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat setempat Sarikat Islam dalam waktu singkat telah menjadi populer di mata rakyat daerah ini. Pada tahun 1914 Sarikat Islam sudah dapat berdiri di daerah Uluan, seperti di daerah afdeling Pegunungan Palembang. Bahkan organisasi ini telah dapat masuk pada daerah onderafdeling dan marga-marganya. Adapun daerah-daerah tersebut adalah daerah onderafdeling Rawas dan daerah sekitarnya, daerah onderafdeling Komering Ilir dan daerah sekitarnya serta daerah-daerah lainnya.

Proses penyebaran Sarikat Islam, seperti telah disebut di atas, tidaklah terlepas dari kegigihan yang dilakukan oleh Raden Gunawan dan peran serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan oleh Raden Gunawan adalah mendekati tokoh atau pemuka dan bahkan pejabat setempat. Lewat tokoh-tokoh tersebut Sarikat Islam diperkenalkan secara jelas, baik anggaran dasar maupun tujuannya, sehingga dapat berkembang dengan cepat. Berkat peran para tokoh itu pula, semua aktivitas Sarikat Islam dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, kegiatan Sarikat Islam yang dilakukan di daerah afdeling Pegunungan Palembang dan daerah sekitarnya tampak berperan ganda. Pada satu sisi, kegiatannya ditujukan untuk menyatukan dan membangkitkan semangat Islam yang telah tenggelam dalam kekuasaan penjajah Belanda. Sedang pada sisi lain, kegiatannya diarahkan terhadap gerakan missionaris Katholik di Tanjungsakti. Kegiatan missionaris itu, didukung oleh pemerintah Hindia Belanda, bahkan juga mendapat bantuan dana. Sasaran utamanya adalah meng-katholikan rakyat setempat dengan harapan mereka akan loyal terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Itu semua dilakukan tentu saja untuk melancarkan roda pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu untuk menarik perhatian penduduk setempat, terutama lapisan bawah, para missionaris mendirikan sekolah-sekolah, dan poliklinik atau rumah sakit dengan mendatangkan dokter dan perawat. Dua kegiatan tersebut, dipersiapkan sebagai ujung tombak para missioner. Namun demikian, meskipun ditunjang oleh fasilitas dana dan tenaga, tetapi hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Pada umumnya mereka hanya berhasil mempengaruhi masyarakat bawah di Tanjungsakti.

Dengan demikian berdirinya Sarikat Islam di daerah ini saat itu dapat membendung meluasnya pengaruh agama Katholik. Lebih jauh, organisasi tersebut (Sarikat Islam) kemudian dapat memperluas penyebaran agama Islam pada masyarakat yang belum mempunyai dasar keimanan yang kuat. Kehadiran Sarikat Islam dengan segala aspek kegiatannya terasa semakin kuat pengaruhnya di dalam kehidupan masyarakat daerah ini. Karenanya tidaklah mengherankan, gerakan yang dilakukan oleh Sarikat Islam tersebut menyebabkan banyak orang melepaskan keimanan mereka sebagai penganut agama Katholik. Kejadian terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan Juli - Agustus 1914. Ketika itu pada setiap malam berpuluh-puluh orang melaporkan diri, bahwa mereka telah memeluk agama Islam. Proses ini terus berlanjut sampai pada tahun 1916, meskipun jumlahnya berkurang tetapi penganut agama Islam terus bertambah.

Pada tahun 1914 Sarikat Islam telah berdiri di Lahat, ibukota afdeling Pegunungan Palembang. Berdirinya Sarikat Islam di



daerah tersebut juga atas jasa Raden Gunawan, dan tokoh-tokoh daerah ini seperti Anang Abdurrahman, dibantu oleh kawan-kawannya. Dalam waktu singkat organisasi ini berhasil mempunyai pengikut yang cukup besar jumlahnya. Kemudian terus meluaskan pengaruhnya sampai ke pelosok-pelosok, seperti pada margamarga dan dusun-dusun. Sehingga dalam periode 1914-1920, anggota Sarikat Islam di Onderafdeling Lematang Ulu sudah tercatat  $\pm$  5.000 orang.

Pemimpin-pemimpin Sarikat Islam di daerah yang terkenal antara lain adalah Anang Abdurrahman sebagai Presiden Sarikat Islam Lokal daerah Lahat, Nang Buyung dan M. Nasir sebagai Presiden Sarikat Islam Lokal Lematang Ulu, dan Haji Muhammad Apil sebagai Presiden Sarikat Islam Lokal Marga Gumai Lembak yang termasuk daerah onderafdeling Lematang Ulu. Sedang Presiden SI lokal onderafdeling Lematang Ilir, yang beribukota Muara Enim adalah Sahim. Presiden Sarikat Islam Lokal daerah Langkayat adalah Dulwahid dan sebagai Presiden Sarikat Islam Lokal daerah Tanah Abang adalah Topah.

Dalam tahun 1914 Raden Gunawan memasuki daerah Pagaralam, daerah onderafdeling Pasemah dan berhasil mendirikan cabang Sarikat Islam di daerah tersebut. Tokoh setempat yang ikut mendirikan organisasi tersebut adalah seorang pesirah bernama Sanibar Sadat dan dialah yang kemudian menjadi Presiden Sarikat Islam Lokal yang pertama. Tetapi tanpa alasan yang jelas ia kemudian mengundurkan diri. Sementara orang menduga hal itu terjadi karena ia seorang pesirah yang merupakan bagian dari pegawai pemerintah Hindia Belanda. Mungkin tindakan itu terpaksa dilakukan karena ia mendapat ancaman atasannya. Karena itu, demi kelancaran pergerakan Sarikat Islam, ia menyerahkan jabatan tersebut kepada orang yang geraknya lebih bebas.

Untuk mengisi kekosongan pimpinan Sarikat Islam Lokal Cabang Lahat, maka diadakan rapat anggota. Rapat berhasil menetapkan Aburahim bin Alis sebagai ketua, dengan Tame sebagai wakil dan Senamak Penantian sebagai sekretaris. Susunan

pengurus baru ini kemudian dilaporkan kepada Pengurus Pusat Sarikat Islam di Surabaya. Tidak lama kemudian datanglah Surat Keputusan Ketua Pusat Sarikat Islam, Umar Said Cokroaminoto, tentang pengangkatan Aburahim bin Alis sebagai Ketua Sarikat Islam Lokal cabang Pagaralam.

Dalam Kongres Sarikat Islam III Aburahim bin Alis turut hadir di Surabaya. Ia turut berperan aktif dalam kongres tersebut yang berlangsung pada 29 September – 6 Oktober 1918 di Gedung Panti Aryoso Surabaya. Kongres ini diikuti oleh 87 cabang Sarikat Islam Lokal dengan jumlah peserta sebanyak 450.000 orang.

Kongres ini antara lain membicarakan kesukaran-kesukaran hidup yang dialami rakyat sebagai akibat dari kekejaman yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kongres menuntut penurunan pajak, menghapuskan hak atas tanah partikelir, untuk kepentingan rakyat dan memperluas pengajaran. Khusus tentang perpajakan tersebut kongres meminta agar dibentuk sebuah panitia yang terdiri atas pegawai negeri dan orang-orang partikelir yang bertugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan rakyat yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Mengenai tanah partikelir kongres menuntut penghapusan *ponenale sanetie*. Agenda penting yang dibicarakan dalam kongres ini adalah pembentukan Volksraad. Selain itu, khusus untuk daerah Karesidenan Palembang telah pula dibicarakan tentang pembentukan *Raad Marga* (dewan marga).

Selaku pengurus Aburahim bin Alis selalu berusaha mewujudkan cita-cita SI seperti yang telah diputuskan dalam kongres III di Surabaya. Ia terus bekerja keras, walau mendapat rintangan dari pemerintah kolonial Belanda, karena dianggap mengganggu kelancaran roda pemerintahannya. Namun demikian, rintangan-rintangan itu tidak membuat Aburahim mundur. Semakin dihalangi aksi mereka semakin hebat dan semangat mereka semakin berkobar karena didorong oleh semboyan *jihad* yang terus didengung-dengungkan oleh pemuka agama (ulama). Aksi dan tuntutan itu mereka ditujukan kepada pemerintahan

kolonial, terutama dalam menentang bermacam-macam bentuk pajak yang memberatkan rakyat dan menentang rodi yang diwajibkan kepada rakyat.

Demikianlah akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh Sarikat Islam, Aburahim selaku Ketua Sarikat Islam Cabang Pagaram mendapat tindakan dari pemerintah Hindia Belanda. Kegiatan yang dimotori oleh Aburahim bin Alis itu telah mengganggu kelancaran pemerintah kolonial di daerah Pagaram. Oleh karena itu demi keamanan dan ketentraman pemerintah kolonial, Aburahim bin Alis yang dianggap membangkang itu ditangkap. Kemudian ia dibuang ke Bulongan Kalimantan dan ia mendapat hukuman selama 2 tahun 9 bulan.

Akan tetapi semangat juangnya tidak pernah padam, karena setelah menjalani masa hukumannya, Aburahim bin Alis kembali aktif dalam Sarikat Islam. Ia kembali menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memajukan Sarikat Islam dan membela kepentingan rakyat di daerahnya.

Begitu juga halnya nasib yang dialami oleh Nang Buyung Ketua Sarikat Islam Lematang Ulu dan Anang Abdurrahman Ketua Sarikat Islam di Lahat. Mereka mengalami nasib yang sama dengan Aburahim bin Alis yang dianggap pengacau. Dengan alasan tersebut pada tahun 1919 Anang Aburahim ditangkap. Mula-mula dibuang ke Surabaya, tetapi kemudian dipindahkan ke Kalimantan dan ia meninggal di sana. Sedang Nan Buyung mendapat hukuman selama 3 tahun. Nasib yang sama dialami pula oleh Haji Muhammad Apil Ketua Sarikat Islam di Marga Gumai Lembak, karena dianggap bersalah ia ditangkap dan dipenjarakan di Lahat. Selain itu, Keling Midar yang berasal dari dusun Jati, Lahat, juga ditangkap dan dipenjarakan selama 2 tahun.

Mengikuti mobilitas Sarikat Islam di Karesidenan Palembang, agaknya cukup menarik untuk mengungkapkan perjuangan organisasi ini di daerah Bingin Teluk, onderafdeling Rawas Iilir. Berdirinya Sarikat Islam di daerah ini juga tidak terlepas dari peranan Raden Gunawan. Seperti di tempat-tempat lain

kedatangannya di Bingin Teluk, onderafdeling Rawas Iilir, Raden Gunawan disambut dengan semangat oleh Pesirah Abdulhamid dan kawan-kawannya. Ketika itu Abdulhamid sedang menjabat Pesirah (Dipati) di marga Suka Pindah.

Setelah mendapat penjelasan dan pengarahan dari Raden Gunawan, Pesirah Abdulhamid beserta kawan-kawan langsung mendirikan cabang Sarikat Islam di Bingin Teluk. Pengurus SI Cabang Bingin Teluk adalah Abdulhamid bin Setipal sebagai presiden (ketua) Lokal, Dulhaji bin Sebayan sebagai sekretaris dan Dulkasip bin Setipal, adik Pesirah sebagai bendahara.

Tersusunnya pengurus Sarikat Islam di daerah ini telah memperlancar penyaluran informasi-informasi penting organisasi tersebut kepada penduduk di daerah ini dan daerah sekitarnya. Sehingga dalam waktu singkat pengaruhnya telah tersebar luas di kalangan penduduk. Keberhasilan Sarikat Islam untuk mendapat pengikut yang banyak dalam waktu yang singkat ini, tidaklah terlepas dari usaha dari para aktivisnya untuk dapat menyadarkan para pemuka rakyat, pamong desa, tokoh-tokoh agama serta guru-guru ngaji. Seperti yang dilakukan Haji Lasjim, yang mempropagandakan kedudukan dan peran Sarikat Islam di daerah Biaro dengan cara yang sangat mengesankan, sehingga hampir seluruh rakyat daerah ini menjadi anggota Sarikat Islam.

Pendekatan lain, yang dilakukan oleh para aktivis Sarikat Islam adalah dengan turut melibatkan diri secara aktif dalam melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti menghidupkan kebiasaan tolong-menolong bagi warga yang sedang dalam kesusahan atau sedang membutuhkan. Juga untuk meringankan beban bagi warga masyarakat, para aktivis Sarikat Islam menghidupkan semangat gotong-royong. Dengan kegiatan-kegiatan itu, organisasi yang masih terhitung berusia muda itu telah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat di daerah Teluk Bingin dan sekitarnya.

Sementara itu, pemerintahan kolonial Hindia Belanda dibawah pimpinan Van Wijk selaku *kontroleur* yang berkedudukan di

Surolangon, merasa cemas melihat perkembangan Sarikat Islam. *Kontrolleur* merasa was-was dan apabila organisasi yang didukung oleh umat Islam itu dibiarkan dan tidak dibatasi ruang geraknya pasti akan menyulitkan Belanda. Hal itu akan berakibat pada rencana pembukaan jalan sepanjang lima kilometer antara dusun Lesang dan Batun tidak akan terselesaikan. Apalagi dalam Kongres Sarikat Islam III di Surabaya diputuskan bahwa kerja rodi yang dipaksakan oleh pemerintah Hindia Belanda agar dihapus. Abdulhamid bin Setipal dengan tegas telah menanamkan hal itu kepada rakyatnya.

Selain itu, keberhasilan Sarikat Islam dapat menembus lapisan bawah di daerah Uluan, seperti di daerah Rawas umpamanya, adalah karena daerah ini merupakan basis perlawanan Sultan Badaruddin III pada awal abad ke-19. Tetapi kemudian dalam mewujudkan Pax Nederlantika, Belanda dapat menguasai daerah Uluan. Pada masa awal abad ke-20 campur tangan pemerintah kolonial Belanda sangat terasa, terutama dalam pemerintahan paling bawah, yaitu pemerintahan marga-marga. Dikeluarkan bermacam-macam peraturan, seperti pajak, kerja rodi dalam pembukaan jalan-jalan dan lainnya sangat memberatkan rakyat. Kesemua itu telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat serta membangkitkan kebencian rakyat terhadap Belanda. Kegelisahan dan kebencian rakyat itu ditampung oleh Sarikat Islam yang datang tepat pada waktunya, sehingga rakyat merasa mendapat pelindung. Karena itulah rakyat berbondong-bondong masuk menjadi anggota Sarikat Islam.

Seperti yang telah tertuang dalam anggaran dasarnya tujuan SI adalah memajukan rakyat, menjalin persaudaraan di antara sesamanya, tolong-menolong di kalangan muslimin dan melindungi rakyat dari penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Sehubungan dengan itu para tokoh Sarikat Islam daerah ini menganggap tindakan pemerintah kolonial Belanda tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tindakan pemerintah tersebut secara keseluruhan telah meningkatkan emosi Sarikat Islam di daerah ini terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh sebab itu, sebagai reaksi, pada tahun 1915 Abdulhamid bin Setipal, menunjuk

Muhammad Amin, untuk memobilisasi massa dalam rangka melakukan perlawanan fisik terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Untuk kepentingan tersebut, Muhammad Amin, yang dianggap “sakti” (ilmu hitam) membentuk 40 kelompok kekuatan dan setiap kelompok itu dipimpin oleh seorang Hulubalang. Mereka dilatih taktik perang, dan juga ilmu kebatinan atau tenaga dalam. Adapun anggota-anggotanya direkrut dari anggota Sarikat Islam dan para simpatisannya. Pasukan inilah yang dipersiapkan untuk melawan Belanda. Pasukan ini biasa disebut *pasukan kelambit* dalam pemberontakan rakyat di Karesidenan Palembang.

Gerakan ini sering dihubungkan dengan Sarikat Abang yang diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia. Kalau diamati lebih jauh, dugaan demikian merupakan kesalahpahaman belaka, karena Sarikat Abang di sini merupakan suatu bagian dari Sarikat Islam yang mendapat pengaruh kuat dari Turki yang pengikut-pengikutnya selalu memakai ikat kepala dari kain warna merah sebagai identitasnya. Tradisi memakai ikat kepala warna merah ini sudah ada sejak tahun 1916 di Karesidenan Palembang sampai ke daerah Uluu. Pada masa itu di Kota Palembang sendiri banyak orang memakai kopiah Turki yang bentuknya bulat tinggi seperti selender, tetapi agak mengecil bagian atasnya, sehingga kelihatan seperti kerucut yang dipotong dan di atasnya dipasang jambul. Warna kopiah ini merah dan disebut kupiah stambul. Kopiah merah inilah agaknya yang telah mengilhami organisasi ini untuk mengikatkan di kepala pengikutnya sebagai tanda pengenal. Demikian pula di daerah Muara Rupit yang termasuk onderafdeling Rawas, tahun 1918 telah berdiri Sarikat Islam dengan Dauh sebagai presiden lokal, Akep dan Jabar sebagai propagandis. Dalam pertengahan tahun 1918 mereka mengadakan rapat gelap yang dihadiri oleh 60 orang anggota. Tujuan rapat ini adalah untuk membicarakan dan mengatur langkah-langkah dalam usaha pembayaran pajak yang dianggap terlalu tinggi. Akan tetapi nasib sial menimpa, karena tidak terduga, mereka itu tiba-tiba digrebek oleh polisi kolonial Belanda dan karenanya rapat bubar, pesertanya lari kocar-kacir untuk menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini banyak orang yang tertangkap dan salah satu di antaranya adalah Jabar. Selain dianiaya oleh polisi, mereka dimasukkan ke penjara

Musi Rawas selama tiga hari. Kemudian mereka itu diajukan ke *Landraad* Musi Rawas dan mereka itu termasuk Jabar mendapat hukuman masing-masing selama 6 bulan, karena dituduh melakukan rapat gelap.

Akibat kegiatan-kegiatannya yang cenderung melawan pemerintah Sarikat Islam dalam tahun dua puluhan dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian, secara diam-diam, dengan dalih ceramah agama, kegiatan SI berjalan terus. Di samping menyampaikan ceramah agama yang berkisar pada ajaran-ajaran Islam dan mereka juga menyelipkan cita-cita untuk membebaskan diri dari penjajahan kolonial Belanda. Sejalan dengan aktivitas ini, Sarikat Islam Muara Rapi dibawah pimpinan Daud Wijaya terus aktif melakukan kegiatannya. Dengan perantaraan propagandis Sarikat Islam Muara Rapi organisasi ini mengadakan hubungan dengan gerakan Sarikat Abang di daerah perbatasan Jambi dan daerah Surolangon Rawas.

Begitu juga aktivitas Sarikat Islam di daerah onderafdeling Komering Ilir yang telah berdiri sejak tahun 1915. Seorang tokohnya adalah Burniat yang lahir tahun 1901 di dusun Sugih Waras, pendidikan yang ditempuhnya *Voorvolk School*, lima tahun dan kursus normal dua tahun. Ia aktif dalam Sarikat Islam terutama Partai Kaum Tani yang merupakan *onderbow* Sarikat Islam. Karena aksi-aksi yang dilancarkannya, ia keluar masuk penjara dan terakhir ia dibuang ke Boven Digul bersama-sama keluarga termasuk ibu, istri dan anak-anaknya. Pada tahun 1939 ia dan keluarganya diperbolehkan pulang ke Palembang.

Demikianlah mobilitas Sarikat Islam. Berkat propaganda yang hebat anggota Sarikat Islam, dapat mencapai dua juta orang. Begitu pula cabang Sarikat Islam di daerah Karesidenan Palembang, selain jumlahnya semakin meningkat aktivitasnya dalam menentang pemerintahan kolonial Belanda juga makin berkembang. Aksinya terutama ditujukan pada penghapusan pajak-pajak yang memberatkan rakyat, penghapusan tanah-tanah partikelir (tuan tanah Eropa) dan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kaum buruh untuk mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa setempat.

Akibat dari aksi-aksi yang telah dilancarkan oleh Sarikat Islam, adalah tindakan drastis yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan tanpa didukung oleh bukti yang kuat pemerintah menangkap para pemimpin organisasi tersebut dan selanjutnya dipenjarakan atau diasingkan di tempat-tempat di luar Karesidenan Palembang. Pada tahun 1920 Sarikat Islam di daerah ini secara keseluruhan sudah menjadi organisasi terlarang atau dibubarkan secara paksa.

Dengan pembubaran Sarikat Islam tidaklah berarti organisasi yang telah dicintai rakyat ini lenyap begitu saja. Sarikat Islam sebagai satu badan boleh saja dihilangkan, tetapi cita-cita dan semangat anti penjajah yang telah ditanamkan tidaklah mudah terhapus. Rakyat telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan harga diri sebagai suatu bangsa yang berbudaya. Karenanya tanpa adanya unsur paksaan dari tokoh manapun, kebencian terhadap kaum penjajah tetap meluap-luap. Jiwa mereka menuntut dan menginginkan kebebasan dari belenggu penjajah. Sehubungan dengan itu, maka pemuka-pemuka Sarikat Islam berusaha menyatukan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.



## BAB V

### PERLAWANAN MENENTANG PEMERINTAH KOLONIAL

Sekitar tahun 1914 - 1920 hampir di seluruh Karesidenan Palembang telah berdiri cabang-cabang Sarekat Islam yang memiliki jumlah anggota cukup banyak. Tokoh-tokoh Sarekat Islam di Palembang waktu itu antara lain: Raden Nangling dan M. Yahya (Poksol). Presiden lokal Sarekat Islam untuk Keresidenan Palembang waktu itu adalah Raden Nangling.

Berkembangnya Sarekat Islam di daerah ini telah menambah semangat perlawanan terhadap segala bentuk penindasan khususnya terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda.

Cara Sarekat Islam untuk mendapatkan pengikut dalam waktu yang relatif singkat adalah dengan mempengaruhi pemuka-pemuka masyarakat setempat, seperti pamong desa, pemuka-pemuka agama atau guru-guru ngaji. Usaha-usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara pendekatan yang tepat, seperti melalui kegiatan-kegiatan sosial menolong warga yang sedang mengalami kesusahan atau kemalangan serta meningkatkan semangat gotong royong dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Dengan cara seperti itu dapat dikatakan bahwa Sarekat Islam pada waktu itu merupakan suatu wadah yang menampung aspirasi masyarakat tertindas dan juga sebagai alat pemicu semangat untuk melawan dan mengusir penjajah Belanda.

Melihat semakin meluasnya pengaruh Sarekat Islam di daerah Palembang tersebut pemerintah kolonial Belanda merasa cemas dan khawatir, sehingga mulai membatasi berbagai kegiatan Sarekat Islam. Hal itu menyebabkan banyak terjadi konflik-konflik antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam yang berkembang menjadi perlawanan.

Perlawanan-perlawanan tersebut merupakan protes terhadap kesewenangan-wenangan pemerintah kolonial Belanda. Adapun motif perlawanan tersebut antara lain adalah adanya rasa tidak puas atau tidak senang terhadap peraturan pemerintah kolonial, seperti pungutan pajak atau masalah pelanggaran hak-hak adat. Perlawanan-perlawanan rakyat yang terjadi pada awal abad ke-20 ini merupakan kelanjutan atau masih berhubungan dengan perlawanan abad sebelumnya (abad ke-19) yang semuanya diilhami oleh pengaruh ajaran Islam dan semangat jihad fisabilillah dari pengikut atau anggota Sarekat Islam.

### ***5.1. Perlawanan di daerah Rawas (1915)***

Seperti diketahui pada awal abad ke-19 daerah Rawas dan sekitarnya merupakan basis perlawanan Sultan Mahmud Badharuddin II terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan itu terjadi sebagai akibat dari intensifikasi kekuasaan Belanda ke daerah Pedalaman/Uluan. Pada awal abad ke-20 sangat terasa campur tangan pemerintah kolonial dalam pemerintah marga-marga (dusun). Pemerintah kolonial Belanda ketika itu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan pajak yang sangat memberatkan rakyat.

Selanjutnya pelaksanaan kerja rodi seperti pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat serta menumbuhkan rasa kebencian yang mendalam terhadap penjajah Belanda.

Kegelisahan di kalangan masyarakat tersebut telah ditampung dan diberikan obat penenang oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi Sarekat Islam dengan ajaran anti kafir, sehingga rakyat merasa mendapat perlindungan atau juru selamat.

Berdasarkan anggaran dasarnya, tujuan Sarekat Islam antara lain adalah : mencapai kemajuan rakyat, menjalin persaudaraan di antara sesama, tolong menolong dikalangan kaum muslim, dan melindungi rakyat dari penindasan dan tindakan sewenang-wenang.

Dalam waktu singkat Sarekat Islam ternyata dapat menjadi organisasi yang sangat populer di kalangan masyarakat Rawas Bingin Teluk. Banyak rakyat menjadi anggota organisasi ini. Memerlihatkan perkembangan dan meluasnya organisasi Sarekat Islam itu Van Wijk pimpinan (Controleur) pemerintah kolonial Belanda di Surolangun merasa khawatir, ia berpendapat apabila tidak dibatasi organisasi ini akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kolonial Belanda. Khususnya dalam usaha pembuatan jalan yang membentang sepanjang 5 km antara dusun Lesang dan Batun (sebelum Kota Surolangun).

Tindakan pemerintah kolonial Belanda tersebut dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai reaksi terhadap tindakan pemerintah kolonial Belanda, maka pada tahun 1915 pimpinan Sarekat Islam mempersiapkan massanya untuk mengadakan perlawanan fisik terhadap pemerintah kolonial Belanda yang bertindak sewenang-wenang. Mereka mulai dilatih untuk berperang dengan dibekali dan diajari dengan ilmu-ilmu kebathinan. Usaha untuk melatih rakyat ditunjang oleh seorang bernama Moh. Amin yang kemudian terkenal dengan nama "Kelambit", yang diserahi tugas untuk memberikan latihan dan mengajarkan ilmu "Kelambit".

Ilmu Kelambit biasa juga disebut "Ilmu Kelelawar" karena Moh. Amin dan pengikut-pengikutnya hanya bergerak pada waktu malam hari, seperti halnya kelelawar yang hanya keluar pada malam hari. Pengikut-pengikut Moh. Amin dibagi atas kelompok-kelompok dan berjumlah 40 kelompok. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang yang disebut hulubalang. Karena memimpin 40 orang hulubalang maka kelompok ini dikenal juga dengan nama "Hulubalang 40".

Munculnya pasukan Kelambit di daerah Bingin Teluk hampir bersamaan waktunya dengan terjadinya pemberontakan di Jambi yang dipimpin oleh dua orang bangsawan keturunan Sultan-sultan Jambi yaitu: Raden Toha dan Raden Mongong. Berita Perlawanan Rakyat Jambi itu didengar oleh Pasirah Abdul Hamid Bin Setipal (Presiden lokal Sarekat Islam di daerah Rawas Ilir), sehingga semangatnya berkobar-kobar untuk mengusir penjajah Belanda itu dari daerah Palembang. Tekadnya semakin bulat untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Ia kemudian mengirim dua orang kurir H. Lasyim dan H. Zakaria ke Jambi untuk meminta bantuan laskar, untuk menyerbu benteng Belanda di Surolangun Rawas. Hari dan tanggal penyerbuan telah ditentukan, sehingga bila bala bantuan dari Jambi datang tepat pada waktunya, pasti benteng Belanda tersebut akan dapat dihancurkan.

Perkembangan berikutnya ternyata menjadi semakin tegang karena rencana perlawanan yang telah dipersiapkan oleh Depati Abdul Hamid Bin Setipal itu diketahui oleh pemerintah kolonial Belanda melalui mata-matanya. Pemerintah kolonial Belanda segera mempersiapkan serdadu marsose yang didatangkan dari Jawa. Pemerintah kolonial Belanda berusaha menggagalkan rencana pemberontakan dengan cara mencegat kurir yang diutus oleh Depati Abdul Hamid ke Jambi.

Dalam perjalanan pulang kurir yang bernama H. Lasyim dicegat pasukan Belanda lalu ditangkap dan akhirnya dipenjarakan di Benteng Surolangun dengan suatu penjagaan ketat. H. Lasyim menyadari bahwa berhasil atau tidaknya perlawanan berada ditangannya, karena itu ia nekad melarikan diri untuk menyampaikan berita kepada Depati Abdul Hamid. Tetapi sayang usahanya tidak berhasil, ia tertembak mati serdadu Belanda dan gugurlah ia sebagai seorang kesuma bangsa.

Kematian H. Lasyim makin mengobarkan semangat para pemuka-pemuka Sarekat Islam yang menamakan diri pasukan Kelambit untuk dapat membalas kematiannya dan melanjutkan perjuangannya. Pasukan Kelambit kemudian dipersiapkan untuk

segera menyerang benteng Belanda di Surolangun dipimpin langsung oleh Pesirah Abdul Hamid.

Persiapan penyerangan dimulai di daerah Bingin Teluk dan dari sini pasukan Kelambit mulai melakukan gerakan, hampir seluruh masyarakat Bingin Teluk turut menggabungkan diri dalam pasukan itu untuk menyerbu benteng Belanda di Surolangun.

Dari berbagai jurusan pasukan berkumpul di Muara Rupit yang terletak ± 25 km dari Surolangun Rawas. Sambil menunggu kabar dari Jambi, Pasukan Kelambit mulai mengatur siasat untuk masuk ke benteng Belanda. Setelah ± tujuh hari lamanya di Muara Rupit, datanglah H. Zakaria membawa berita dari Jambi, bahwa Raden Toha dan Raden Mongong sanggup memberikan bantuan. Kemudian diputuskan untuk menyerang benteng Belanda tanggal 31 Oktober 1916 pukul 06.00 pagi. Pada waktu yang telah ditentukan itu secara bersamaan semua pasukan yang telah dipersiapkan akan menyerbu dari berbagai jurusan benteng Surolangun. Sehubungan dengan itu sejak tanggal 30 Oktober 1916 pasukan telah bergerak dari tempat peristirahatan di Muara Rupit menuju ke Surolangun.

Namun, rencana penyerbuan benteng Belanda di Surolangun ini tercium oleh Belanda. Belanda kemudian mempersiapkan pasukannya dengan baik. Dimana sebagian serdadu marsose ditempatkan di kiri dan kanan jalan untuk menghadapi serangan pasukan Depati Abdul Hamid. Karena itu ketika pasukan Kelambit menyerbu benteng, dengan mudahnya serdadu Belanda yang bersembunyi di kiri dan kanan jalan menembaki pasukan Kelambit. Serangan rakyat dengan mudah dapat dipatahkan dan sebagian yang masih hidup melarikan diri.

Sebagian marsose dikirim ke luar kota untuk mencegah bantuan yang datang dari Jambi, sehingga terjadilah perang yang cukup seru di daerah perbatasan.

Pertempuran tersebut tidak seimbang, marsose Belanda adalah pasukan yang telah terlatih dan telah berpengalaman. Mereka juga mempunyai senjata yang modern seperti pistol, senapan dan lain-lain. Sebaliknya pasukan Kelambit memiliki

prajurit yang kurang terlatih dan belum berpengalaman serta mempergunakan senjata yang sangat sederhana seperti: kujur, pedang, keris dan lain-lain.

Menyadari kekurangannya pasukan Kelambit mengharapkan bantuan dari Jambi. Tetapi bantuan yang diharapkan tidak kunjung datang (karena sudah dicegat oleh pasukan marsose). Akibatnya pasukan Kelambit harus bertempur sendiri melawan Belanda. Pertempuran berlangsung cukup seru ada semangat membara pada pasukan itu, mereka ingin mengusir Belanda dari bumi Palembang.

Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Kelambit dipimpin Depati Abdul Hamid terjadi dalam waktu singkat, namun kerugian yang diderita tidak sedikit. Lebih dari seratus orang pasukan rakyat mati tertembak, beberapa orang luka berat dan ringan serta ratusan orang tertangkap oleh Belanda.

Kegagalan itu antara lain disebabkan oleh bocornya rencana penyerbuan serta karena siasat Belanda yang lebih baik dan berencana. Abdul Hamid kemudian memerintahkan kepada pasukannya agar mengundurkan diri ke hutan. Korban meninggal diperkirakan sebanyak  $\pm$  120 orang dan beberapa ratus orang ditawan dimasukkan ke dalam benteng yang merupakan sebuah tanah lapang terbuka dikelilingi kawat berduri sehingga para tawanan tersebut tertimpa hujan dan juga kepanasan oleh sinar matahari.

Sisa-sisa pasukan dan pada pemimpin yang masih selamat segera mengundurkan diri ke hutan, walau pun mereka terus diburu oleh pasukan Marsose. Pemerintah kolonial Belanda selanjutnya melakukan pembersihan terhadap para pemberontak yang berada di dusun-dusun (perkampungan), ketika ditemukan orang yang dicurigai mereka langsung ditangkap dan ditahan.

Sementara itu Depati Abdul Hamid Bin Setipal bersama pasukannya mengundurkan diri ke daerah Sungai Tingkip dan dari sana mereka berusaha mengatur siasat untuk mengadakan penyerangan berikutnya. Sementara itu pasukan marsose terus

melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Depati Abdul Hamid beserta pasukannya di hutan seberang Biaro Rawas.

Depati Abdul Hamid beserta pasukannya kemudian dibawa dengan kapal Seng Hong Bie menuju ke Surolangun dan mereka ditahan dalam kandang kawat yang bagian atasnya terbuka. Setelah ± tiga bulan di Surolangun Abdul Hamid Bin Setipal, Abdullah Bin Setipal serta Kelambit alias Moh Amin, dipindahkan penjara Palembang. Mereka diinterogasi selama beberapa bulan sebelum diajukan ke pengadilan. Akhirnya ketiga serangkai pimpinan pemberontakan itu harus menjalani hukuman mati. Sesuai putusan pengadilan kolonial Belanda di Palembang mereka mendapat hukuman gantung di depan umum yang dilaksanakan di benteng Palembang pada hari Sabtu tanggal 21 April 1917 pukul 07.00 pagi.

Sebelum hukuman mati dilaksanakan, si terhukum diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kepada sanak keluarganya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Abdul Hamid yang sudah berada dibawah tiang gantungan untuk berpesan kepada anaknya yang bernama Abdul Harun.

Isi pesan Abdul Hamid antara lain; bahwa semua pekerjaan harus dilakukan dengan jujur; terus mengaji Al Qur'an; tanamlah pohon karet; dan lanjutkan terus perjuangan.

Demikianlah antara lain pesan terakhir Abdul Hamid kepada anaknya. Pelaksanaan hukuman gantung yang mengerikan itu disaksikan oleh sebagian besar penduduk Palembang waktu itu. Jenazah ketiga pahlawan itu kemudian diserahkan kepada keluarganya dan selanjutnya dikebumikan di pekuburan Tanah Miskin (pekuburan Kemboja sekarang) Palembang.

Setelah pelaksanaan hukuman gantung tersebut, pemerintah kolonial Belanda terus melakukan tindakan kepada para pemberontak dan kepada mereka yang bersalah akan dipenjara atau dihukum buang. Beberapa pemberontak antara lain; Penggawa Serawang, Umar Gunawan, Mayatin, Masaratin,

H. Abdulah dan lain-lain, dihukum penjara di buang ke Pulau Seram selama 20 tahun.

Sedangkan H. Zakaria dan H. Hakim juga dibuang ke Pulau Seram selama 15 tahun. Selain itu masih banyak rakyat yang dianggap pemberontak yang dihukum antara satu sampai sepuluh tahun. Setelah Pemberontakan Kelambit, tindakan pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat semakin kejam. Dengan berbagai siasat dan taktik Pemerintah Hindia Belanda terus membebani rakyat dengan kerja paksa (rodi) dan berbagai pajak yang harus dibayar.

Pada tahun 1920 Sarekat Islam di daerah Musi Rawas telah dilarang oleh pemerintah Belanda, tetapi secara diam-diam mereka tetap menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang bercita-cita membebaskan diri dari penjajahan kolonial Belanda. Sementara itu Sarekat Islam di Muara rupit di bawah pimpinan Daud Wijaya selalu berhubungan dengan Sarekat Abang dengan perantaraan Adi Akup. Seperti diketahui bahwa Sarekat Abang tersebut telah ada di daerah itu sejak meletusnya perang Kelambit di daerah Surolangun Rawas.

Masyarakat umum sering menghubungkan pemberontakan Kelambit dengan "Sarekat Abang" yang sering menimbulkan kesalahpahaman Sarekat Abang sering diasosiasikan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Karena itulah perlu dijelaskan bahwa Sarekat Abang yang dimaksud bukanlah PKI, melainkan suatu bagian dari organisasi Sarekat Islam yang mendapat pengaruh dari Turki Muda yang para pengikutnya selalu memakai ikat kepala kain merah.

Pengaruh Turki di Keresidenan Palembang dapat dilihat antara lain dengan banyaknya orang memakai "Kupiah Turki" dalam bentuk yang lucu berwarna merah serta berjambul yang biasa disebut *Kupiah Stambul*. Pada ± tahun 1916 Kupiah Stambul ini banyak terlihat di wilayah Keresidenan Palembang sampai ke daerah Uluan.

Walaupun pemberontakan Kelambit gagal, pada tahun 1918 di Muara Rupit yang termasuk Onderafdeling Rawas telah kembali



berdiri Cabang Sarekat Islam dibawah pimpinan Dauh sebagai presiden lokal, Akip sebagai propagandis dibantu oleh Djabar. Dalam pertengahan tahun 1918 Sarekat Islam dibawah pimpinan Dauh mengadakan rapat gelap yang dihadiri 60 orang anggota. Rapat ini bertujuan untuk mengatur langkah dalam usaha pembaikotan terhadap peraturan pembayaran pajak yang tinggi. Ketika rapat sedang berjalan tiba-tiba mereka digrebeg oleh polisi kolonial, sehingga rapat harus dibubarkan. Banyak di antara mereka yang ditangkap dan selanjutnya dimasukkan ke penjara Musi Rawas, untuk diajukan kepengadilan (Lanraad Musi Rawas). Di antaranya Djabar, menerima hukuman 6 bulan penjara, karena dianggap melanggar larangan rapat.

### ***5.2 Perlawanan di Muara Tulung Selapan (1916)***

Sarekat Islam mulai masuk wilayah Palembang pada tahun 1911, dibawa oleh dua orang tokoh Sarekat Islam yaitu RM. Tirta Adisuryo dan R. Gunawan. Dalam waktu singkat pengaruh Sarekat Islam telah tersebar di kalangan masyarakat di wilayah Keresidenan Palembang, bahkan masyarakat menganggap Sarekat Islam sebagai "Juru Selamat" terhadap segala macam bentuk penindasan pemerintah kolonial. Pada tahun 1915 di Keresidenan Palembang mulai berdiri cabang Sarekat Islam yang aktif melawan segala bentuk penindasan kolonial.

Sebagai suatu organisasi massa Sarekat Islam selalu membela kepentingan rakyat banyak. Pimpinan Cabang SI mulai berusaha menggerakkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Keresidenan Palembang. Perlawanan tersebut dimulai dengan adanya aksi pembangkangan rakyat (mata gawe) Marga (Dusun) Tulung Selapan, rakyat tidak bersedia membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Aksi pembangkangan tersebut menimbulkan kerusuhan, sehingga suasananya menjadi tegang dan rakyat semakin bersemangat mengadakan perlawanan.

Dalam aksi kerusuhan itu seorang mata gawe dusun Tulung Selapan berhasil menikam seorang Asisten Demang sampai meninggal dunia. Pemerintah kolonial Belanda di Tulung Selapan merasa kesulitan juga menghadapi aksi masyarakat itu. Dalam

upaya memadamkan perlawanan pemerintah Belanda di Palembang terpaksa mengirimkan 40 orang serdadu ke dusun Tulung Selapan, tapi belum berhasil juga memadamkan aksi pemberontakan tersebut.

Aksi perlawanan rakyat Tulung Selapan baru berhasil dipadamkan setelah pemerintah kolonial Belanda memperoleh bantuan dari seorang Pasirah yaitu Pasirah Kayu Agung yang bernama Haji Bakeri Gelar Pangeran Koesoma Joeda. Berkat bantuan Pasirah Kayu Agung akhirnya ketentuan mata gawe (rakyat) Tulung Selapan kembali seperti sediakala dan para mata gawe itu juga akhirnya mau kembali mematuhi dan membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

### ***5.3 Perlawanan di Daerah Onderafdeeling Komerling Ulu (1918)***

Sewaktu Onder Afdeeling Rawas sedang berlangsung “Perang Kelambit”, didusun Kotanegara wilayah Onderafdeeling Komerling Ulu juga timbul perlawanan rakyat yang dimotori oleh organisasi Sarekat Islam. Ternyata perlawanan rakyat “Kelambit” tersebut banyak memberi pengaruh terhadap aksi perjuangan rakyat dusun Kotanegara tersebut.

Perlawanan rakyat Dusun Kotanegara tersebut antara lain dipimpin oleh Naga Beriang, HA. Hamid Ronik, Singo Putro dan lain-lain, bertujuan untuk menentang peraturan-peraturan pajak pemerintah Belanda yang memberatkan rakyat. Namun karena senjata serta strategi sangat lemah perlawanan dengan mudah dapat dipadamkan oleh Pemerintah Kolonial. Di daerah Onder afdeling Komerling Ilir, pada tahun 1915, juga telah berdiri Cabang Sarekat Islam dengan tokohnya bernama Burniat yang dilahirkan pada tahun 1901 didusun Sugih Waras. Burniat aktif di organisasi Sarekat Islam terutama pada Partai Kaum Tani ( PKT) yang merupakan Onderbouw Sarekat Islam. Pada tahun 1925 Burniat diangkat sebagai pemimpin PKT Sugih Waras.

Di samping di Sarekat Islam dan Partai Kaum Tani Burniat juga aktif di Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1926 ia termasuk seorang pengendali dan pengurus partai itu.

Selanjutnya Burniat dengan Sarekat Islam dan PKTnya mulai melancarkan aksi-aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda seperti gerakan tidak mau membayar pajak dan tuntutan penghapusan tanah-tanah Erfah yang timbul akibat adanya penanaman modal asing yang sangat merugikan rakyat.

Akibat aksi-aksi tersebut Burniat ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Cipinang Jakarta dari tahun 1926 – 1928. Hukuman itu diakhiri di penjara Palembang, karena ia dikirim kembali ke Palembang oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah keluar dari penjara Palembang perjuangan Burniat bukannya surut, tetapi malahan semakin bersemangat. Karena itulah pada 10 Agustus 1928 ia kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman yakni dibuang ke Boven Digul (Irian Jaya) bersama seluruh keluarganya dan Burmiat baru kembali lagi ke Palembang pada tahun 1939.

#### ***5.4 Perlawanan di dusun Karta Mulia (1918)***

Dusun Karta Mulia terletak di daerah Onder afdeeling Organ Iilir. Awalnya dusun ini aman tentram rakyatnya hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Setelah pemerintah kolonial Belanda masuk ke daerah Palembang desa yang aman tentram ini mulai terganggu dengan berbagai macam aturan pajak dan kerja rodi yang ditetapkan oleh Belanda.

Masuknya Sarekat Islam ke Palembang sampai juga ke dusun Karta Mulia ini, yang disambut hangat oleh masyarakat karena dianggap membawa perubahan. Dengan dukungan Sarekat Islam, rakyat dusun Karta Mulia pada awal tahun 1918 mulai melancarkan aksi perlawanan terbuka terhadap kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut merupakan manifestasi protes rakyat Karta Mulia terhadap kesewenang-wenangan Pemerintah dalam mengatur pajak dan kerja rodi (gawe raja). Pada awalnya perlawanan rakyat dusun Karta Mulia ini cukup menyulitkan Belanda, tetapi dengan kekuatan senjata dan taktik / strategi yang jitu, Belanda akhirnya dapat memadamkan pemberontakan.

## **5.5 Akibat Perlawananan**

Berkembangnya Sarekat Islam di daerah Palembang Sumatera Selatan, yang selalu menentang kebijaksanaan pemerintah kolonial mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat. Hal itu terjadi terutama karena sifat gerakan yang berbaur Islam dan bersifat demokratis, sehingga dianggap sesuai dengan watak dan jiwa masyarakat yang tidak mengenal status atau tingkatan dalam penggolongan masyarakat. Gerakan rakyat di daerah Ulu (di marga-marga) untuk menentang pemerintah kolonial Belanda waktu itu merupakan gerakan “nasionalisme” yang timbul dari rasa kebangsaan (kedaerahan) yang murni, membela hak hidup mereka menurut adat dari ajaran Islam.

Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam waktu itu pada umumnya hanya berpendidikan madrasah-madrasah atau *VOORVOLKS SCHOOL*. Mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi banyak yang berjuang di Jawa, dan dari Jawa mereka membawa faham nasionalisme ke daerah Palembang, terutama setelah timbulnya Partai Nasional Indonesia sekitar tahun 1927 – 1929.

Pada tanggal 20 sampai 27 Oktober 1917 Sarekat Islam mengadakan kongres Sarekat Islam II di Jakarta. Setelah kongres tersebut perjuangan Sarekat Islam kelihatan mulai bergeser ke kiri yaitu dengan menyusupnya aliran Sneevliet ke dalam tubuh Sarekat Islam melalui perantaraan Semaun dan Darsono. Ke dua tokoh ini selain aktivis Sarekat Islam Cabang Semarang mereka adalah anggota *Indische Sociale Democratisch Vereniging (ISDV)*.

Pada kongres Sarekat Islam yang III tahun 1918, yang diselenggarakan di Surabaya semakin jelas bahwa perjuangan organisasi ini telah bergeser ke kiri. Kongres antara lain memutuskan untuk meningkatkan kepentingan kaum buruh serta menggerakkan semua organisasi bangsa Indonesia agar menentang kapitalisme dan kolonialisme Belanda. Pada tahun 1919 anggota Sarekat Islam mencapai 2 juta orang. Di daerah Palembang, selain jumlah anggotanya semakin banyak, gerakan-gerakannya untuk menentang kolonialisme dan kapitalisme juga semakin meningkat.

Gerakan-gerakan tersebut terutama ditujukan bagi penghapusan pajak-pajak yang memberatkan rakyat, penghapusan tanah erfah dan membuat peraturan-peraturan sosial bagi kaum buruh untuk mencegah perlakuan yang sewenang-wenang. Walaupun belum begitu berhasil tetapi aksi-aksi perlawanan tersebut telah membuat Belanda mengalami kesibukan tersendiri dan cukup merepotkan.

Dari berbagai aksi tersebut pemerintah kolonial Belanda selalu berusaha dan bertindak cepat. Misalnya seperti menindas pemberontakan di Musi Rawas (Perang Kelambit) dan pemimpin-pemimpinnya dijatuhi hukuman gantung. Dengan tumbuhnya Sarekat Islam di daerah ini, pemerintahpun tidak segan-segan melakukan tindakan keras terhadap anggota-anggotanya yang menentang kebijaksanaan pemerintah. Banyak pemimpin-pemimpin organisasi tersebut yang ditangkap atau diasingkan, seperti didaerah Komering Ulu (dusun Kertanegara) antara lain Naga Beriang, HA Hamid Ronik, Singo Putro dan lain-lain. Sebagai akibat logis dari aksi-aksi yang telah dilancarkan oleh Sarekat Islam itu maka pemerintah kolonial Belanda telah mengambil suatu tindakan drastis yaitu menangkap para pemimpin organisasi tersebut kemudian memenjarakan atau mengasingkan ke tempat-tempat di luar Karesidenan Palembang. Selanjutnya pada tahun 1920 secara keseluruhan Sarekat Islam didaerah ini dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dengan pembubaran Sarekat Islam daerah Palembang ini tidak berarti Sarekat Islam telah lenyap dari bumi Sriwijaya, karena cita-cita dan semangat anti kafir tetap berurat dan berakar di kalangan masyarakat. Dengan kata lain ide-ide atau semangat Sarekat Islam telah tersebar luas sampai ke pelosok-pelosok daerah Sumatera Selatan. Dengan penuh semangat dan harapan dari belunggu penjajahan, pemuka-pemuka Sarekat Islam didaerah ini bekerjasama dengan pemuka-pemuka agama lain terus mengadakan gerakan secara diam-diam.

Selain membubarkan Sarekat Islam, pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1919 mengadakan tindakan drastis terhadap para pemimpin organisasi Sarekat Islam. Mereka ada yang

ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Bahan ada juga yang diasingkan ke berbagai tempat di luar wilayah Karesidenan Palembang.

Mereka itu antara lain, Anang Abdurrachman (Presiden Lokal Sarekat Islam Onderafdeeling Lematang Ulu), yang ditangkap pada tahun 1919 lalu diasingkan ke Surabaya, kemudian dari Surabaya dibuang lagi ke Kalimantan sampai akhirnya ia meninggal disana, Nang Buyung (Presiden lokal SI Cabang Lahat), H. Moh. Apil (Presiden lokal Marga Gumau Lebak), Rangkep Keling Midar (seorang kurir dari dusun Jati) ketiganya ditangkap pada tahun 1919 lalu dijatuhi hukuman penjara Lahat masing-masing 3 tahun, dan 2 tahun.

Pada tahun 1920 pemerintah kolonial Belanda juga menangkap seorang pemimpin Sarekat Islam di daerah Pagar Alam yaitu Presiden Lokal Pagar Alam yang dituduh menghasut masyarakat. Ia adalah Aburohim bin Alis yang diasingkan ke Pulau Kalimantan (daerah Balongan) selama 2 tahun 9 bulan. Berita tentang penangkapan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam ini sampai juga ke berbagai pelosok desa.

Penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Sarekat Islam tersebut, mengakibatkan menurunnya keinginan masyarakat untuk mengadakan perlawanan secara fisik. Setelah banyak pemimpin mereka yang ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan, aksi-aksi secara fisik menjadi berkurang. Mereka kemudian lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat rohaniah, seperti memberikan ceramah-ceramah kepada rakyat yang bersifat keagamaan, membangkitkan semangat rakyat serta memberi petunjuk agar rakyat dapat lepas dari penderitaan, serta menanamkan semangat anti penjajahan.

Setelah gerakan Sarekat Islam dilarang oleh pemerintah Belanda tahun 1920, di Musi Rawas orang-orang Sarekat Islam secara sembunyi-sembunyi tetap memberikan ceramah-ceramah kepada rakyat yang isinya berkisar kepada ajaran-ajaran agama Islam dan cita-cita untuk membebaskan diri dari penjajah Belanda. Sementara itu di Muara Rupit, dibawah pimpinan Dauh Wijaya

orang-orang Sarekat Islam selalu berhubungan dengan Sarekat Abang melalui perantara yang bernama Akip. Seperti diketahui Sarekat Abang telah ada di daerah ini sejak meletusnya Perang Kelambit di perbatasan Jambi dengan daerah Surolangun Rawas.

Surutnya Sarekat Islam di daerah Sumsel pada sekitar tahun 1920 mengakibatkan masuknya pengaruh organisasi-organisasi politik lain. Secara berturut-turut organisasi-organisasi politik masuk ke Sumatra Selatan yaitu PKI tahun 1926, PNI tahun 1927, Partindo tahun 1931 dan PNI Baru 1932. Namun, ternyata partai-partai tersebut kurang mendapat simpati masyarakat Palembang, yang masih setia pada Sarekat Islam.

Partai-partai politik tersebut secara terang-terangan melancarkan sikap non kooperasi sehingga mendapat reaksi keras dari pemerintah kolonial Belanda. Belanda kemudian membatasi kegiatan partai-partai politik tersebut. Oleh sebab itu sebagian tokohnya mengalihkan kegiatan dan melanjutkan perjuangan melalui jalur agama. Partai politik yang berlandaskan agama dan mendapat pengaruh besar di daerah ini adalah Partai Sarekat Islam (PSII). Bahkan, H.O.S Cokroaminoto pernah datang sendiri menghadiri pembentukan cabang PSII di Mendayun (Onderafdeling Komerang Ulu).

## BAB VI

### PERJUANGAN POLITIK SETELAH TAHUN 1920

Sementara itu PKI mulai hadir di wilayah Karisidenan Palembang pada tahun 1926 dengan beberapa orang tokohnya, antara lain S.M. Nungtjik dan S. Hasan. Dari Palembang, PKI menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya, antara lain ke Duma Sugihwaras (Onderafdeeling Komening Hilir) dengan seorang tokohnya bernama Burniat bin Haridin.

Di daerah Baturaja (ibu kota afdeeling Ogan Komening Hilir) juga telah berdiri Sarekat Rakyat (onderbouw PKI), dengan tokoh-tokohnya antara lain: Aburohim bin Awang (ketua), M. Mahmud (bendahara), dan Ruslan Adenan. Ruslan Adenan adalah seorang karyawan toko mesin singer yang lahir di Palembang tahun 1906 dan berpendidikan Voorvolkschool 5 tahun.

Gerakan Sarekat Rakyat ini dapat dikatakan sebagai gerakan di bawah tanah, karena setelah pemberontakan di Jawa Barat, organisasi ini tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda, akibatnya banyak tokoh-tokohnya yang ditangkap. Hal seperti itu terjadi pula pada orang-orang Sarekat Rakyat Ranting Baturaja, yang mengadakan gerakan di bawah tanah. Mereka mendapat tindakan kejam dari pemerintah kolonial Belanda. Berkat bantuan Demang dan Asisten Demang Baturaja para pemimpin PKI dapat ditangkap. Mereka yang ditangkap antara lain Aburohim bin



Anang, M. Mahmud dan Ruslan Adenan. Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda.

Di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 berdiri organisasi baru yang bernama PNI (Perserikatan Nasionalis Indonesia), yang berdasarkan sosionasionalistis. Organisasi ini mulai masuk Palembang pada pertengahan tahun 1927 dan dapat berkembang dengan pesat serta meluas ke berbagai pelosok daerah Sumatra Selatan. Terutama setelah Mr. Ahmad Soebardjo berada di Kota Palembang untuk menjabat Kepala Kantor Advocaat mewakili Mr. A.A. Maramis, yang sedang melaksanakan cuti selama beberapa bulan ke luar Palembang. Pada bulan September 1927 berdirilah cabang Partai Nasional Indonesia di Palembang dengan pengurus, Samidin sebagai ketua, Wahyudi sebagai sekretaris, dan Udin Saleh sebagai bendahara.

Hampir bersamaan waktunya partai ini berkembang ke pedalaman Palembang, yaitu di dusun Air Hitam Marga Penukal dengan beberapa tokoh, antara lain Hamzah Koentjit bin Mahadam, Kisam bin Barasip, Soelaiman, KGS. Ahmad Rasad.

Pada awalnya masyarakat daerah pedalaman tidak begitu tertarik pada partai baru ini, terutama karena takut dituduh komunis. Di samping itu masyarakat juga masih terikat pada cara berpikir Syariat Islam yang fanatik. Selanjutnya berkat keahlian A.J. Patty sebagai juru bicara PNI, partai ini berkembang dengan pesat. A.J. Patty kemudian menyelenggarakan pendidikan kader melalui kursus-kursus politik, dan mengadakan rapat-rapat umum. Adanya berbagai kegiatan itu membuat masyarakat Palembang mulai tertarik dan berniat mendaftarkan diri menjadi anggota PNI.

Sejak awal PNI telah menjalankan politik non-kooperasi, dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Karena itulah partai ini selalu "diperhatikan" oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pernah mendapat "peringatan" dari Gubernur Jenderal pada sidang Volksraad tanggal 15 Mei 1928.

Timbulnya kesadaran kebangsaan dan meningkatnya semangat persatuan yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928,

dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Karena itulah sepak terjang partai-partai politik selalu mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah kolonial Belanda.

Belanda itu adalah dipakainya pasal-pasal “karet” dari Undang-undang hukum pidana, antara lain :

- (1) pasal 153, bis, yang berbunyi: “Barang siapa dengan perkataan tulisan atau gambar melahirkan pikirannya baik secara menyindir maupun samar-samar memuat anjuran untuk mengganggu keamanan umum atau menentang kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maksimal enam tahun atau denda maksimal 300 gulden.”
- (2) Pasal 153, ter, yang berbunyi: “Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti dimaksud dalam pasal 153 bis, dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun atau denda 300 gulden.”
- (3) Pasal 161, bis, yang berbunyi: “barang siapa menimbulkan atau memperluas pemogokan, sedang ia tahu atau dapat mengira-ngirakan bahwa pemogokan itu akan mengakibatkan gangguan-gangguan keamanan umum atau kegoncangan dari kehidupan ekonomi dalam masyarakat dapat dihukum penjara maksimal; atau didenda maksimal 1000 gulden.

Seorang propagandis PNI di Palembang, yaitu Hamzah Koentjit menyebarkan surat-surat selebaran yang isinya menghasut dan menghina pemerintah Belanda. Oleh sebab itu pada bulan Oktober 1929 dilakukan pengeledahan umum di seluruh Palembang terutama terhadap rumah-rumah anggota PNI. Karena terbukti menyebarkan poster-poster atau selebaran tersebut, maka Hamzah Koentjit diajukan ke Pengadilan Palembang dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Setelah naik banding ke Batavia, hukuman Hamzah Koentjit dikurangi menjadi tiga tahun penjara. Sementara kawan lawan Hamzah

Koentjij yang membantu menyebarkan surat-surat selebaran itu dihukum penjara, secara bervariasi antara 1 tahun sampai 6 tahun penjara. Mereka itu antara lain : Kgs. Ahmad Rasyid (6 bulan), Kgs. Abu Bakar (6 bulan), dan Sulaiman bin Toha (1 tahun).

Memperhatikan keadaan dan kondisi daerah yang cukup membahayakan, akhirnya A.J. Patty diasingkan ke Ruteng Flores, pada tanggal 20 Juni 1930. Kemudian dipindah ke Boven Digul pada Desember 1932 bersama anak dan istrinya.

Mula-mula AJ Patty dikenal sebagai orang pendiri PNI di Palembang. Ia sebenarnya bukan putra daerah Palembang. Kehadirannya di Palembang berstatus sebagai orang buangan, karena kegiatannya dalam Sarekat Ambon. Mula-mula ia diasingkan ke Bengkulu kemudian dipindahkan ke Palembang.

Beberapa tokoh PNI, seperti Soekarno, Gatot Mangkuprodo, Supriadinata, dan Maskun pada tahun 1929 ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal itu menimbulkan kekecewaan politik di Hindia Belanda dan perpecahan dalam tubuh PNI. Ada golongan yang ingin membubarkan PNI dan sebaliknya ada golongan yang ingin mempertahankan PNI.

Dalam suatu kongres yang diadakan tahun 1931 di Jakarta diputuskan bahwa PNI akan dibubarkan, sebab sesuai keputusan *Raad van Justitie* tanggal 17 April 1931 PNI ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Dalam kongres itu PNI Cabang Palembang mengirimkan Noentjij A.R. yang terpaksa menerima keputusan tersebut, walaupun pada dasarnya ia tidak setuju jika PNI dibubarkan. Tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama, akhirnya PNI Cabang Palembang membubarkan diri pada tahun 1931.

Di bawah pimpinan Noentjij A.R, para anggota PNI yang telah membubarkan diri membentuk sebuah partai baru yang bernama Partindo Cabang Palembang pada tahun 1931, dengan susunan pengurus; Mohammad Yahya (ketua), Udin Saleh (bendahara) dan Mohammad Toher dan Abdulhamid Kemang (pembantu). Selanjutnya golongan yang tidak setuju dengan pembubaran PNI

menamakan diri “golongan merdeka” pada bulan April 1932 mendirikan PNI Cabang Palembang, dengan pengurusnya; Samidin (ketua), S. Hanung (sekretaris), dan Sudarso (bendahara), organisasi ini yang dikenal pula dengan nama PNI baru .

Organisasi yang merupakan wadah perjuangan rakyat Sumatra Selatan yang berfaham nasionalisme setelah PNI bubar adalah Partindo dan PNI baru. Semakin lama ruang gerak organisasi-organisasi tersebut semakin terbatas bahkan kemudian terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokohnya sebab pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Vergader Verbod sebagai kelanjutan dari artikel-artikel karet. Oleh karena itulah organisasi partai-partai politik mulai membatasi berbagai kegiatan serta aksi-aksi politiknya. Bahkan sebagian dari tokoh-tokoh politik di daerah Sumatera Selatan mulai membanting setir mengalihkan kegiatannya dengan menempuh jalur agama dalam rangka melanjutkan perjuangannya.

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) merupakan suatu partai politik yang berlandaskan agama dan memperoleh pengaruh besar di Sumatera Selatan (Palembang). Pada tahun 1933 dilaksanakan Kongres Partai Sarekat Islam Indonesia, yang diantaranya membicarakan penghapusan undang-undang perkawinan bagi orang Islam, adanya usaha-usaha memajukan kaum tani dengan menyerahkan tanah-tanah erfpacht serta tidak memperpanjang tanah erfpacht yang sudah diberikan, mengambil kembali tanah-tanah erfpacht yang belum diusahakan, serta mendirikan perkumpulan kaum tani supaya dapat mendirikan perusahaan-perusahaan secara bersama.

Berbagai aksi PSII tersebut justru mendapat sambutan dari masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Selanjutnya PSII cabang Palembang meminta kepada Ketua Umum PSII untuk menunjuk Abdul Saleh Mattjik sebagai anggota kujnah Tanfidyah yang ditempatkan di Palembang dengan tugas memberi bimbingan kepada cabang-cabang PSII di daerah Sumatera Selatan dan membentuk cabang-cabang baru.

Untuk memulai tugasnya, Abdul Mattjik mengadakan perjalanan keliling ke seluruh pelosok Karesidenan Palembang

sampai ke marga-marga dan dusun-dusun. Bahkan sampai ke daerah Bangka dan Lampung. Di beberapa daerah Abdul Saleh Mattjik menyelenggarakan ceramah-ceramah untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat guna mencapai kemerdekaan.

Berbagai kegiatan Abdul Mattjik tersebut selalu dicurigai PID dan dianggap menghasut rakyat untuk menentang pemerintah, sehingga tidak jarang Abdul Mattjik ditahan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah setempat. Untuk mencegah meluasnya pengaruh Partai Sarekat Islam di kalangan masyarakat pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1933 menyatakan bahwa PSI sebagai organisasi terlarang bagi para pegawai negeri (*ambtenaaren*) dan ada pula larangan untuk berkumpul atau rapat.

Setelah dikeluarkannya *Vergadee Verbod* (larangan berkumpul) Partai Sarekat Islam mengalihkan perjuangannya melalui jalur pendidikan. Melihat kegiatan Partai Sarekat Islam di Jawa yang semakin memperbanyak pendirian sekolah-sekolah, maka cabang-cabang Partai Sarekat Islam di daerah Palembang pun mulai membuka sekolah-sekolah baru. Satu sekolah Partai Sarekat Islam di Palembang yang mengalami kemajuan cukup baik dan diterima oleh masyarakat adalah Pendidikan Islam Air Itam yang lokasinya di dusun Air Itam Marga Pemukal (*onderafdeeling Musi Ilir*) yang didirikan oleh Bapak H.A. Hamid. Sekolah-sekolah Islam di dusun Air Itam makin meluas ke daerah-daerah sekitarnya, bahkan sampai ke Lematang Ulu. Sampai dengan tahun 1940 di daerah Air Itam telah muncul 10 buah sekolah Partai Sarekat Islam. Melihat perkembangannya yang cukup pesat tersebut, maka pemerintah kolonial Belanda mencurigai dan mengawasi pendidikan Islam di Air Itam tersebut. Bahkan sebagai tandingan pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Schakel school* pada tahun 1941 di daerah Air Itam.

Dengan adanya berbagai peraturan dari pemerintah kolonial Belanda, hilanglah kesempatan untuk hidup dan bergerak bagi partai-partai politik yang menganut azas non kooperatif. Setelah tahun 1930-an, partai-partai yang menganut azas non kooperatif

umumnya mulai membubarkan diri dan selanjutnya muncul dengan nama baru yang menganut azas kooperasi.

Kembalinya Dr. Sukiman dari negeri Belanda menyebabkan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) mengalami perpecahan kembali, yaitu antara pihak HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim dengan pihak Dr. Sukiman dan Suryopranoto akibatnya Dr. Sukiman dan Suryopranoto dipecat dari PSII dan selanjutnya mereka mendirikan partai baru yang dinamakan Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1932.

Cabang PII mulai berdiri di Palembang pada tahun 1936, dengan tokoh-tokohnya antara lain: KH. Cikwan, KH. Mansyur Ashari, Rahman Thalib, M. Yayah, M. Hawit, Raden Ibrahim dan A. Karim. Partai Islam Indonesia ini berazas kooperasi, karena itu partai baru ini dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam Palembangraad. KH. Cikwan merupakan wakil Partai Islam Indonesia di dalam Palembangraad.

Kemudian pada tahun 1936 di Kota Palembang berdiri sebuah parpol baru yaitu PARINDRA dengan para tokohnya antara lain Dr. Maas, Salam Astrokusumo, M.J. Suud, R.M. Akib dan Azhari. Sebagai partai politik yang berazaskan kooperasi PARINDRA juga mempunyai wakil di dalam Palembangraad. Organisasi ini dipimpin oleh dr. M. Isa, mempunyai beberapa cabang dengan anggota kurang lebih 2.100 orang.

Beberapa orang tokoh politik bekas anggota Partindo dan PNI baru seperti M. Tohir, Nungtjik AR, Samidin dan AS Sumadi kemudian mendirikan Gerindo di Kota Palembang pada sekitar pertengahan tahun 1937. Menjelang perang Pasifik, Gerindo mempunyai ± 25 cabang dengan jumlah anggota ± 4.000 orang. Sebagai organisasi kooperasi Gerindo mengirimkan wakil-wakilnya ke *Gemeente Raad* Palembang yaitu AS. Sumadi, M. Tohir, dan Mgs. Jalauddin. M. Tohir juga merupakan wakil Gerindo dalam Palembang Raad. Di dewan-dewan marga Gerindo juga mendudukkan wakil-wakilnya.

Selanjutnya pada tanggal 1 dan 2 Agustus 1939 Gerindo menyelenggarakan kongres yang ke-2 di Kota Palembang.

- 3) Di gedung bioskop Orange dengan pembicara: KH. Mansyur Azhari.

Berbeda dengan sebelumnya, Aksi GAPI tersebut ternyata tidak memperoleh reaksi keras dari pemerintah kolonial Belanda. Sepertinya ada “sesuatu” dengan sikap lunak pemerintah kolonial Belanda itu. Ternyata hal itu antara lain disebabkan oleh adanya perubahan situasi dunia yang cukup genting. Pemerintah kolonial Belanda cukup sibuk dengan situasi perang di Eropa dan adanya bahaya “Perang Pasifik” yang hampir saja pecah. Dengan berbagai kesibukan tersebut tentu saja Belanda tidak dapat lagi bersikap keras terhadap aksi-aksi yang dilancarkan oleh partai-partai politik.

Tentu saja kaum pergerakan kita tidak menyia-nyiakan peluang baik tersebut. Antara tahun 1940 dan 1941 banyak partai-partai politik yang mengajukan tuntutan-tuntutan. Antara lain Indonesia Berparlemen, perubahan pemerintah bahkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai tuntutan dari kaum pergerakan (kaum nasionalis) tersebut tentu saja belum dapat direalisasi karena situasi dunia sedang genting dalam menghadapi “Perang Pasifik”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah Ratu Prawiranegara, Perjuangan Kemerdekaan di Sumatra Bagian Selatan 1945-1950, diterbitkan sendiri, Jakarta, 1997.**
- Anhar Gonggong. HOS Cokroaminoto, Departemen P dan K, Proyek IDSN, Jakarta, 1985.**
- Bina Sosial Daerah Tingkat I Sumsel, Perintis Kemerdekaan Indonesia Riwayat Perjuangan Perintis Kemerdekaan Sumsel, Palembang, 1978.**
- Depdikbud, Sejarah Daerah Sumatra Selatan, Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, Provinsi Sumatra Selatan, 1991/1992.**
- Depdikbud, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sumatra Selatan, IDSN, Jakarta, 1983/1984.**
- Depdikbud, Seminar Kebangkitan Pergerakan Nasional, Proyek IDSN, Jakarta, 1988.**
- Depdikbud, Sumatra Selatan Dipandang Dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan, Proyek IDKD, 1972.**



